

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DI
KABUPATEN ACEH BARAT: STUDI TENTANG PEMANFAATAN
OLEH MASYARAKAT**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IMAM AFDHALI
210802081

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN
2026**

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Imam Afdhali

Nim : 210802081

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh

Barat: Studi Tentang Pemanfaatan Oleh Masyarakat

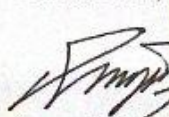
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2026


Imam Afdhali
NIM : 210802081


10000
METERAI
TEMPEL
1329 FAOX122402693

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DI KABUPATEN ACEH BARAT: STUDI TENTANG PEMANFAATAN OLEH MASYARAKAT

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

IMAM AFDHALI
210802081

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si

NIP. 197802032005041001

Cut Zamharira, S.IP., M.AP

NIP. 197911172023212012

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DI
KABUPATEN ACEH BARAT: STUDI TENTANG PEMANFAATAN
OLEH MASYARAKAT

Imam Afdhali
NIM. 210802081

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2026

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001

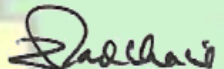
Sekretaris,


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012

Penguji I,


Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ialah untuk melihat efektif pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik di Kabupaten Aceh Barat, dan juga untuk menemukan hal-hal yang menghambat pengelolaannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat serta empat gampong sampel: Ujong Kalak, Ujong Tanjung, Tegal Sari, dan Krueng Beukah. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan sepuluh informan utama. Tujuan pencapaian, integrasi, dan adaptasi adalah tiga dimensi dari kerangka teori Efektivitas Organisasi Richard M. Steers. Model Miles, Huberman, dan Saldana digunakan sebagai pedoman untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SIGAP tidak efektif secara umum. Karena pembaruan data yang tidak berkala, entri data kependudukan secara daerah baru mencapai 9,42% saat ini dari jumlah jiwa. Dalam hal integrasi, koordinasi antara DPMG dan pemerintah gampong masih lemah, dan sosialisasi berbasis masyarakat belum dilaksanakan. Pada aspek penyesuaian, pengelolaan menghadapi tantangan karena banyak operator gampong yang meninggalkan pekerjaan tanpa transfer pengetahuan, kurangnya pelatihan refreshment, dan aplikasi lelah karena SIGAP tidak terintegrasi dengan aplikasi kementerian lainnya. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan portal SIGAP, DPMG dan pemerintah gampong harus membuat SOP standar untuk alih tugas operator, mengadakan pelatihan berkala, dan mengintegrasikan aplikasi pelaporan.

Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Sistem Informasi Gampong (SIGAP), Transparansi, Aksesibilitas Informasi, Administrasi Publik.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Gampong SIGAP di Kabupaten Aceh Barat: Studi tentang Pemanfaatan oleh Masyarakat.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa perkuliahan.
4. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, aparatur gampong, operator SIGAP, serta masyarakat yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi penelitian.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 2026

Imam Afdhali
NIM. 210802081



DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 KAJIAN TEORI	11
2.1.1 Teori Efektivitas.....	11
2.1.2 Electronic Government (E-Government).....	14
2.1.3 Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	15
2.1.4 Transparansi Informasi Publik	16
2.1.5 Partisipasi Masyarakat.....	16
2.1.6 Pemanfaatan Sistem Informasi oleh Masyarakat.....	17
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Fokus Penelitian.....	27
Table 3 Pendapat Richard M Steers.....	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Sumber Data	30
3.5.1 Data Primer	30
3.5.2 Data Sekunder	30

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6.1 Observasi	31
3.6.2 Wawancara Mendalam	31
3.6.3 Dokumentasi.....	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.7.1 Pengumpulan Data.....	32
3.7.2 Reduksi Data (Data Reduction)	32
3.7.3 Penyajian Data (Data Display).....	32
3.7.4 Penarikan Kesimpulan	33
3.8 Keabsahan Data	33
3.8.1 Triangulasi Sumber.....	33
3.8.2 Triangulasi Teknik.....	33
3.8.3 Triangulasi Waktu	34
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat.....	35
4.2 Hasil pengumpulan data.....	40
4.2.1 Efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Ditinjau dari Tiga Dimensi Efektivitas Organisasi di Kabupaten Aceh Barat	40
4.2.2 Faktor Hambatan Efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat	52
4.3 Analisis Pengolahan Data	57
4.3.1 Pengolahan Data Hasil Observasi	57
4.3.2 Pengolahan Data Hasil Dokumentasi.....	59
4.4 Analisis Data.....	62
4.4.1 Analisis Dimensi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment).....	62
4.4.2 Analisis Dimensi Integrasi (Integration)	63
4.4.3 Analisis Dimensi Adaptasi	64
4.5 Pembahasan	65
BAB V	68
KESIMPULAN PENELITIAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekap SIGAP di Aceh	3
Tabel 2. Peneliti Terdahulu.....	19
Tabel 3. Fokus Penelitian.....	28
Tabel 4. Tabel Informan	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Entri Per Gampong 2026	4
Gambar 2 Krangka Berfikir	25
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara pemerintah berfungsi. Pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat pengelolaan data, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.¹ Penggunaan teknologi dalam pemerintahan dikenal sebagai e-government. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah lainnya.²

E-government telah berkembang di tingkat pemerintah pusat dan daerah, serta di tingkat gampong. Sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Diharapkan bahwa pemerintah gampong dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data secara lebih baik, membuat informasi publik lebih transparan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan gampong. Selain itu, digitalisasi pemerintahan gampong adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berarti keterbukaan informasi dan akuntabilitas masyarakat.³

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Sistem Informasi Gampong (SIGAP) merupakan sistem informasi berbasis digital yang dimaksudkan untuk mengelola data gampong dan memberikan informasi kepada masyarakat.

¹ Mukhsin Mukhsin, "Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi," *Teknokom* 3, no. 1 (2020): 7–15.

² Richard Heeks, *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)* (Routledge, 2017).

³ Ines Mergel, Noella Edelmann, and Nathalie Haug, "Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews," *Government Information Quarterly* 36, no. 4 (2019): 101385.

Sistem ini memungkinkan integrasi berbagai data gampong menjadi satu platform, yang memudahkan pemeriksaan data gampong.⁴

Pemerintah Aceh mulai memperkenalkan SIGAP kepada aparatur gampong sejak tahun 2019 melalui pelatihan dan pendampingan. Pada tahun 2020, SIGAP diuji coba dan diperluas untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan gampong di beberapa kabupaten dan kota.⁵ Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang hak masyarakat atas informasi publik serta kewajiban pemerintah kabupaten atau gampong membangun SIAT. Pergub Nomor 33 Tahun 2021 yang mewajibkan gampong melakukan update data kependudukan secara rutin berskala dan menyajikan informasi publik gampong secara transparansi.⁶ Qanun Aceh No. 7 Tahun 2020 SIAT merupakan sistem induk digitalisasi milik pemerintah Aceh, qanun ini mewajibkan semua sistem yang ada di Aceh terhubung ke dalam satu data, dan SIGAP merupakan anak dari SIAT yang memberikan data lokal ke SIAT.⁷ Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pengaturan integrasi data perencanaan pembangunan dan keuangan gampong atau daerah ke sistem nasional, data harus sinkron dengan basis data SIPD agar tata kelola keuangan gampong diakui oleh pemerintah pusat.⁸

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP) yang diperkuat dengan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2025, pembaruan (update) data SIGAP diatur secara berkala dengan pembagian rentang waktu sebagai berikut.⁹ Pertama, pembaruan berkala atau rutin diperuntukkan bagi data dinamis kependudukan, seperti peristiwa kelahiran, kematian,

⁴ Dina Hanifa and Nia Shinta, "Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 48–60.

⁵ Redaksi, "Diskominfo Komit Latih KIG Berdayakan Website Gampong Dan SIGAP," 2019, <https://www.acehtrend.com/news/diskominfo-aceh-komit-latih-kig-berdayakan-website-gampong-dan-sigap/index.html>.

⁶ Sistem Informasi Gampong et al., "Gubernur Aceh," 2021, 2–10.

⁷ JDIH Aceh, "QANUN ACEH NO.MOR 7 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU," 2020.

⁸ Menteri Dalam and Negeri Republik, "BERITA NEGARA," no. 1114 (2019).

⁹ Aceh Terpadu and Informasi Gampong, "Gubernur Aceh," 2025, 1–2.

kependahan, atau kedatangan warga. Aparatur gampong wajib memperbarui data ini setiap ada perubahan atau direkap secara berkala setiap bulannya. Kedua, pembaruan periodik enam bulan diperuntukkan bagi data pembangunan gampong, realisasi program kerja, dan penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Ketiga, pembaruan satu tahun diperuntukkan bagi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta Perencanaan Pembangunan Gampong (RKPG) yang dilakukan mengikuti siklus penetapan anggaran tahunan.¹⁰

Sistem informasi gampong dapat membantu pemerintah gampong mengelola data, menyelenggarakan pelayanan publik, dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara lebih efisien. Oleh karena itu, sistem ini sangat penting. Selain itu, sistem informasi gampong berfungsi sebagai alat transparansi, memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.¹¹

Dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses, SIGAP diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintahan gampong dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang profil gampong, data kependudukan, potensi gampong, program pembangunan, penggunaan anggaran, dan banyak lagi.¹²

Table 1 Rekap SIGAP di Aceh

NO	Kab/Kota	Total Gp	Kondisi saatt ini (07/04/2026	
			Gp. Entri	Capaian
1	Bener Meriah	232	232	100%
2	Aceh Barat	322	321	100%

¹⁰ Gampong et al., "Gubernur Aceh."

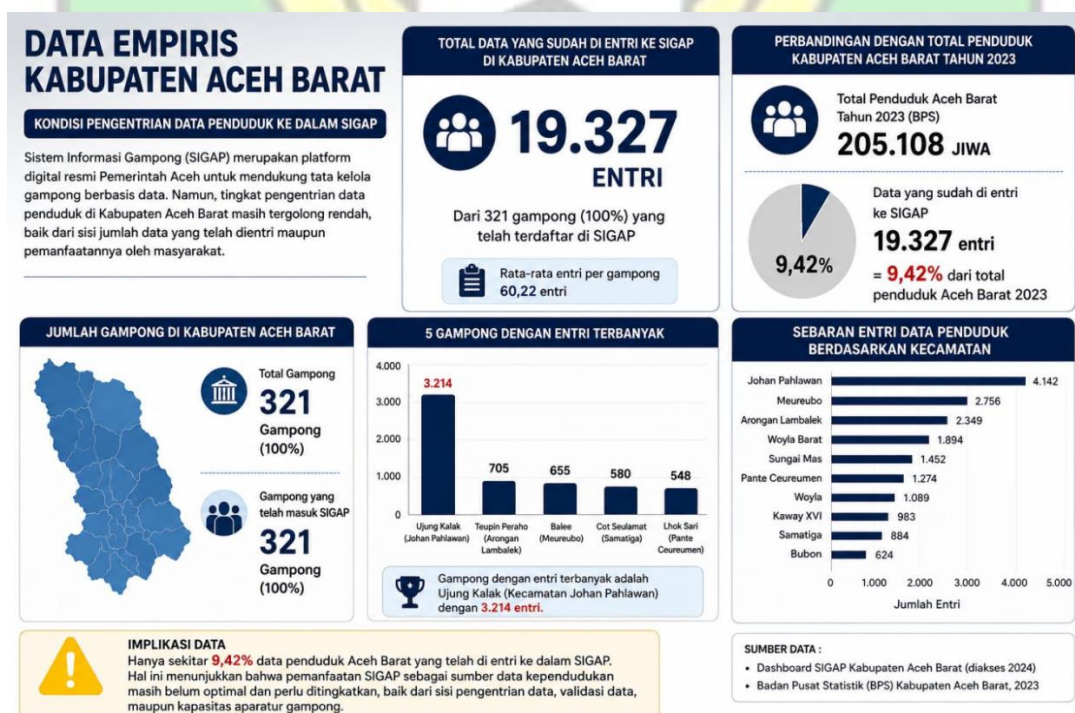
¹¹ Arief Setyawan, Achluddin Ibnu Rochim, and Bambang Kusbandrijo, "Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469) 2, no. 02 (2022): 43–52.

¹² Raihan Wilda and Abid Rifaldi, "Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (Sigap) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Gampong Ulee Tuy," *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 40–46.

NO	Kab/Kota	Total Gp	Kondisi saatt ini (07/04/2026)	
			Gp. Entri	Capaian
3	Semeulue	138	124	89,86%
4	Aceh Selatan	260	225	86,5%
5	Banda Aceh	90	61	67,78%
6	Aceh Besar	604	318	52,65%

Sumber: DPMG Aceh Barat

Berdasarkan Tabel diatas mengenai Rekap Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Provinsi Aceh, terlihat bahwa tingkat penerapan SIGAP pada setiap kabupaten/kota menunjukkan capaian yang berbeda-beda. Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kota yang penerapan SIGAP sudah 100% sejajar dengan Kabupaten Bener Meriah yang telah menerapkan 100 persen. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Simeulue mencapai 89,86 persen, Aceh Selatan 86,5 persen, Banda Aceh 67,78 persen, dan Aceh Besar 52,65 persen.¹³



Gambar 1 Jumlah Entri Per Gampong 2026

¹³ Dokumentasi Rekap SIGAP Provinsi Aceh, update 18 Mei 2026.

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data SIGAP Jumlah entri Penduduk 2026 dan BPS
2024

Berdasarkan data empiris, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 gampong dan seluruhnya telah terdaftar dalam Sistem Informasi Gampong (SIGAP), namun jumlah data penduduk yang telah dientri baru mencapai 19.327 entri, sedangkan jumlah penduduk Aceh Barat tahun 2023 mencapai 205.108 jiwa, sehingga data yang telah dientri ke SIGAP hanya sekitar 9,42% dari total penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIGAP telah diterapkan di seluruh gampong, pengisian dan pemanfaatan data kependudukan belum optimal dan masih terdapat kesenjangan antar-gampong, yang terlihat dari Ujung Kalak sebagai gampong dengan entri tertinggi sebanyak 3.214 entri, sementara beberapa gampong lainnya masih memiliki jumlah entri yang sangat rendah.¹⁴

Permasalahan pengelolaan dan pembaruan data tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur gampong sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengoperasian SIGAP. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur SIGAP, data kependudukan dan data pemerintahan gampong perlu diperbarui secara berkala agar informasi yang tersedia tetap sesuai dengan kondisi aktual.¹⁵ Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kondisi di mana pembaruan data belum dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas operasional aparatur gampong dalam mengelola dan memperbarui data SIGAP masih perlu diperhatikan. Dukungan operasional, termasuk anggaran dan kebutuhan pendukung pengelolaan sistem, juga menjadi bagian yang perlu dilihat untuk mengetahui sejauh mana dukungan tersebut dapat menunjang keberlanjutan pembaruan data SIGAP.¹⁶

¹⁴ Data Jumlah Entri Penduduk SIGAP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026.

¹⁵ Hanifa and Shinta, "Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar."

¹⁶ Hanifa and Shinta.

Selain pelaksanaan pada tingkat gampong, efektivitas penerapan SIGAP juga berkaitan dengan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat.¹⁷ Adanya perbedaan jumlah entri yang cukup besar antar-gampong menunjukkan pentingnya pengawasan untuk memastikan bahwa gampong yang telah terdaftar dalam SIGAP tetap melakukan penginputan data secara berkelanjutan.¹⁸ Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPMG, bagaimana pemantauan terhadap perkembangan data pada masing-masing gampong dilakukan, serta bagaimana tindak lanjut terhadap gampong yang belum melakukan pembaruan data secara optimal. Hal tersebut menjadi penting karena penerapan sistem informasi tidak hanya membutuhkan penyediaan aplikasi, tetapi juga pembinaan dan pengawasan agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan terkait dengan aspek manajemen, terutama bersangkutan dengan kelangsungan operasional operator SIGAP di tingkat gampong. Pengelolaan SIGAP sangat bergantung pada karyawan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan sistem.¹⁹ Jika tidak diikuti dengan pelatihan lanjutan dan proses transfer pengetahuan kepada operator baru, tingginya pergantian operator dapat menjadi masalah. Ini dapat menyebabkan pengetahuan tentang pengoperasian SIGAP tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak pada aktivitas penginputan dan pembaruan data.²⁰ Selain itu, aparatur gampong juga menghadapi berbagai tuntutan administrasi dan penggunaan aplikasi

¹⁷ Zulkifli Zulkifli et al., "Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Layanan Publik Di Desa Paya Awe Aceh Tamiang," *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)* 4, no. 1 (2025): 24–30.

¹⁸ "Jumlah_entri_per_gampong_2026-05-19T04_02_49," 2026.

¹⁹ S Helmi et al., *Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Gampong Dalam Mewujudkan Percepatan Pelayanan Dan Pembangunan Melalui Sistem Informasi Gampong (Sigap)* (CV. Green Publisher Indonesia, 2024).

²⁰ Helmi et al.

pemerintahan lainnya, sehingga adanya tumpang-tindih beban penginputan dari berbagai aplikasi dapat menyebabkan perhatian dan pengelolaan SIGAP menjadi kurang optimal.

Persoalan yang terjadi dalam pengelolaan internal SIGAP, aspek sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan penerapan sistem. SIGAP tidak hanya ditujukan sebagai alat administrasi internal pemerintah gampong, tetapi juga sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan Gampong.²¹ Namun, ketersediaan SIGAP secara digital tidak secara otomatis membuat masyarakat mengetahui keberadaan, fungsi, maupun cara memanfaatkannya. implementasi SIGAP menghadapi kendala berupa kurang optimalnya komunikasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai sistem informasi kepada aparatur gampong dan masyarakat.²² Apabila sosialisasi lebih banyak dilakukan kepada aparatur dan operator untuk kepentingan teknis pengoperasian sistem, sementara penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas, maka tujuan SIGAP sebagai sarana keterbukaan informasi publik bagi masyarakat belum dapat tercapai secara optimal. Temuan Mustika (2024) juga menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu kendala dalam penerapan SIGAP di Aceh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan SIGAP di Kabupaten Aceh Barat, mulai dari kesenjangan antara capaian formal penerapan dengan realisasi data, ketimpangan penginputan antar-gampong, konsistensi aparatur dalam melakukan pembaruan data, fungsi pengawasan dan evaluasi DPMG, keberlanjutan kemampuan operator, hingga pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.²³ Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan SIGAP tidak cukup diukur berdasarkan jumlah gampong yang telah terdaftar dalam sistem, tetapi

²¹ Gampong et al., "Gubernur Aceh."

²² KASIFA NAZIRA, "IMPLEMENTASI WEBSITE SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DI GAMPONG TAMBON BAROH KECAMATAN DEWANTARA" (Universitas Malikussaleh, 2024).

²³ "Jumlah_entri_per_gampong_2026-05-19T04_02_49."

juga perlu dilihat dari proses pengelolaan, pembaruan, pengawasan, dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Permasalahan diatas, peneliti butuh untuk mengetahui seberapa efektif Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pemanfaatannya oleh masyarakat. Penelitian ini penting untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan saat ini dari penerapan SIGAP, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, dan seberapa baik sistem tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar latar belakang tersebut adapun indentifikasi masasalah yaitu:

1. Penerapan aplikasi sigap sudah di terapkan di seluruh gampong, namun jumlah update data penduduk masih sedikit.
2. Jumlah pengimputan di tiap gampong ada kesenjangan yang cukup jauh, ada jumlah pengimputan datanya tinggi dan rendah.
3. Rendahnya tanggung jawab operasional aparatur gampong.
4. Pengawasan oleh DPMG dan pembinaan masih lemah.
5. Masih seringnya terjadi pergantian operator sigap yang tidak di barengi dengan SDM dan tumpang tindihnya beban berbagai aplikasi gampong.
6. Sosialisasi masih sebatas aparatur gampong, tidak menysasar masyarakat sebagai pengguna informasi public.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembaruan data informasi ke dalam system informasi gampong (SIGAP)?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembaruan data informasi ke dalam system informasi gampong (SIGAP)?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan publik, digitalisasi pemerintahan, e-government, dan pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan gampong.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP).
 - b. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam pengembangan dan pembinaan pengelolaan SIGAP pada tingkat gampong.

- c. Bagi Aparatur Gampong, penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan pengelolaan data, pembaruan informasi, dan pemanfaatan SIGAP sebagai media transparansi informasi publik.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan SIGAP sebagai sarana memperoleh informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian yang berkaitan dengan efektivitas sistem informasi desa, e-government, dan transparansi informasi publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Teori Efektivitas

Dalam konteks Ilmu Administrasi Publik, efektivitas merupakan instrumen konseptual utama untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi mampu mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya ditinjau dari aspek formal terlaksananya suatu program, melainkan mencakup penilaian terhadap hasil yang dicapai (outcomes) serta kualitas proses yang melandasi pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, suatu program atau inovasi pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila proses pelaksanaannya berbanding lurus dengan target pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya.²⁴

Secara teoritis, Steers mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pertimbangan proses internal yang berlangsung serta keharmonisan hubungan organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Steers memandang efektivitas sebagai suatu dinamika sistemik yang melibatkan tiga dimensi saling terkait: ketercapaian tujuan, sistem operasional yang digunakan, serta perilaku sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.²⁵

Dalam penelitian ini, Teori Efektivitas Steers digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat. SIGAP merupakan basis data terpadu dan sistem informasi berbasis elektronik yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data serta penyediaan informasi publik di tingkat gampong. Oleh karena itu, efektivitas penerapan SIGAP tidak dapat dinilai sebatas keberadaan platform

²⁴ Dr Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (DR Harbani Pasolong, 2007).

²⁵ Richard M Steers, "Organizational Effectiveness: A Behavioral View," (No Title), 1977.

digital atau pencapaian status terdaftar seluruh gampong ke dalam sistem. Efektivitas SIGAP harus diukur secara substansial melalui ketercapaian tujuan sistem, kelancaran proses komunikasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta tingkat adaptabilitas aparatur dan operator gampong terhadap penggunaan teknologi.²⁶

Berdasarkan pendekatan Steers, efektivitas penerapan SIGAP di Kabupaten Aceh Barat dianalisis melalui 3 (tiga) dimensi indikator utama:²⁷

1. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Dimensi pencapaian tujuan terkait dengan seberapa besar kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan digunakan untuk mengukur seberapa baik SIGAP melakukan tugas utamanya sebagai media pengelolaan data, penyediaan akses publik ke informasi, dan pembaruan (update) data secara berkala.

Meskipun sistem SIGAP secara administratif mencakup seluruh 321 gampong di Kabupaten Aceh Barat, dimensi ini sangat penting karena hasil penginputan data menunjukkan perbedaan yang signifikan antara gampong. Sebagai contoh, Gampong Ujong Kalak memiliki jumlah data yang lebih besar daripada kebanyakan gampong. Fenomena ini menunjukkan bahwa tercapainya tujuan pengelolaan data secara optimal belum serta-merta ditunjukkan oleh keberhasilan formal pendaftaran sistem. Oleh karena itu, aspek pencapaian tujuan difokuskan pada evaluasi ketersediaan data yang memadai, kontinuitas pembaruan data, dan kemanfaatannya untuk pelayanan informasi masyarakat.

2. Integrasi (Integration)

²⁶ Steers.

²⁷ Steers.

Dimensi integrasi merujuk pada kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antar-pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam implementasi SIGAP, keberhasilan platform ini tidak hanya ditentukan oleh keandalan teknologi, melainkan dipengaruhi oleh kualitas hubungan kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Pemerintah Gampong, operator sistem, serta masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator integrasi difokuskan pada pola komunikasi, tata kelola koordinasi, dan jangkauan sosialisasi SIGAP. Penekanan khusus diberikan pada evaluasi jangkauan sosialisasi, yang menentukan apakah sosialisasi SIGAP hanya terbatas pada aparat dan operator gampong teknis atau telah mencapai masyarakat umum sebagai pemanfaat informasi. Karena mandat SIGAP untuk memfasilitasi transparansi dan keterbukaan informasi, keterbatasan saluran SIGAP.

3. Adaptasi (Adaptation)

Bagaimana organisasi dan pelaksana program dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, dinamika lingkungan, dan kemajuan teknologi adalah aspek adaptasi. Daya adaptasi adalah faktor penting dalam menentukan seberapa efektif suatu sistem Steers.

Kajian penerapan SIGAP menggunakan dimensi adaptasi untuk mengukur kemampuan aparat dan operator gampong dalam mengadopsi teknologi informasi dan menanggapi perubahan pola tata kelola administrasi berbasis digital. Ini mencakup kompetensi teknis operator dalam menjalankan aplikasi SIGAP, manajemen turnover operator gampong yang tinggi, kualitas pelatihan dan proses pengalihan pengetahuan (transfer of knowledge), dan daya tanggap aparat desa terhadap tuntutan penggunaan berbagai aplikasi pemerintahan. Keberhasilan sistem secara keseluruhan dapat terhambat oleh kendala dalam pembagian pengetahuan karena pergantian operator,

mengingat pembaruan data SIGAP sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di tingkat bawah.

Dengan menggunakan Teori Efektivitas Steers ketiga dimensi (Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi), penelitian ini tidak hanya mengevaluasi jumlah data yang dimasukkan, tetapi juga dapat mempelajari komponen proses yang berkontribusi pada ketimpangan dalam pencapaian pengelolaan SIGAP antar-gampong di Kabupaten Aceh.

2.1.2 Electronic Government (E-Government)

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka. Salah satu bentuk transformasi ini adalah penerapan e-government, atau pemerintah elektronik, dalam hal pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. E-government merupakan bagian penting dari pembangunan pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan transparan.

Menurut Richard Heeks, e-government adalah penggunaan pemerintah oleh teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya e-government, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien.²⁸

Namun, Richardus Eko Indrajit mengatakan bahwa e-government adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan hubungannya dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah lainnya dengan menggunakan teknologi digital. Implementasi e-government tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintah.²⁹

²⁸ Heeks, *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*.

²⁹ Diah Rachma Aprianty, "Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2016): 1589–1602.

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dirancang untuk mewujudkan e-government dalam pemerintahan gampong. SIGAP dimaksudkan untuk membantu mengelola data dan memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih mudah dan terbuka tentang data, kegiatan, dan kemajuan gampong.

2.1.3 Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) adalah bagian dari upaya digitalisasi pemerintahan gampong untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan pengelolaan data pemerintahan gampong. SIGAP digunakan untuk mengelola data gampong dan memberikan informasi publik. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong memperkuat penggunaan SIGAP di Aceh. Peraturan ini menyatakan tujuan SIGAP untuk meningkatkan pengelolaan data gampong, meningkatkan transparansi data, dan mengintegrasikan data pemerintahan gampong.³⁰ Selain itu, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Informasi Gampong sebagai bagian dari kebijakan Satu Data Aceh memperkuat penggunaan SIGAP.³¹

Pemerintah gampong diharapkan dapat menggunakan SIGAP sebagai media untuk mengelola data penduduk, menyediakan informasi publik, dan sarana transparansi pemerintahan gampong. Melalui penyediaan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi, SIGAP juga diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan pemerintah gampong. Namun demikian, keberhasilan SIGAP diukur dari penerapan sistem di seluruh gampong serta bagaimana masyarakat menggunakannya sebagai pengguna informasi publik. Oleh karena itu, penggunaan masyarakat SIGAP merupakan faktor penting dalam menilai keberhasilan implementasi SIGAP di Kabupaten Aceh Barat.

³⁰ Gampong et al., "Gubernur Aceh."

³¹ Terpadu and Gampong, "Gubernur Aceh."

2.1.4 Transparansi Informasi Publik

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat mengetahui berbagai informasi mengenai kegiatan, kebijakan, serta penggunaan anggaran pemerintah secara terbuka. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.³²

Dalam konteks pemerintahan gampong, transparansi informasi publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Salah satu bentuk transparansi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem informasi digital seperti SIGAP. Melalui SIGAP, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai data dan perkembangan gampong secara lebih mudah, cepat, dan terbuka. Selain itu, transparansi informasi publik juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan gampong. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi, maka semakin besar peluang masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pemerintahan gampong.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan keterbukaan informasi publik. Semakin terbuka informasi yang diberikan pemerintah, maka semakin besar peluang masyarakat untuk

³² M B A Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021).

ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.³³

Dalam konteks pemerintahan gampong, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memperoleh informasi, memberikan pendapat, dan mengikuti kegiatan pemerintahan desa. Dengan adanya SIGAP, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai kegiatan dan perkembangan gampong sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan SIGAP juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan masyarakat, sosialisasi dari aparatur gampong, dan kemudahan akses terhadap sistem informasi tersebut.

2.1.6 Pemanfaatan Sistem Informasi oleh Masyarakat

Pemanfaatan sistem informasi merupakan proses penggunaan teknologi informasi oleh pengguna untuk memperoleh informasi dan memenuhi kebutuhan tertentu. Pemanfaatan sistem informasi menjadi bagian penting dalam penerapan pemerintahan berbasis digital karena keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem tersebut, tetapi juga oleh tingkat penggunaannya oleh masyarakat.³⁴

Dalam pemerintahan digital, pemanfaatan sistem informasi oleh masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui, mengakses, dan menggunakan sistem informasi sebagai sarana memperoleh informasi publik. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem informasi oleh masyarakat, maka semakin besar manfaat sistem tersebut dalam mendukung keterbukaan informasi publik.³⁵

³³ Isbandi Rukminto Adi, "Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," 2015.

³⁴ Hartono M Jogiyanto, "Sistem Informasi Keperilakuan," *Yogyakarta: Andi Offset* 235 (2007).

³⁵ Aprianty, "Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda."

Pemanfaatan sistem informasi oleh dari masyarakat faktor, ketersediaan informasi, serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur gampong. Selain itu, pembaruan data secara berkala juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, pemanfaatan SIGAP oleh masyarakat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan SIGAP, mengakses informasi yang tersedia dalam SIGAP, serta memanfaatkan SIGAP sebagai media informasi dan transparansi publik di Kabupaten Aceh Barat.



2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Table 2 Peneliti Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Krangka Berfikir	Metode	Teknik Analisi Data	Hasil Penelitian	Gap
1	Hanifa et al. (2024). ³⁶	Implementasi SIGAP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas gampong	Kualitatif deskriptif	Analisis interaktif (reduksi, display, verifikasi)	SIGAP meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun data belum sepenuhnya valid	Penelitian Hanifa et al. berfokus pada kesiapan dan akuntabilitas internal aparatur gampong di Aceh Besar dengan kerangka e-government. Novelty Penelitian Ini: Penelitian ini berfokus pada efektivitas pemanfaatan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna informasi publik di Kabupaten Aceh Barat menggunakan Teori Efektivitas Steers (1977) (Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi) untuk menjawab

³⁶ Hanifa and Shinta, "Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar."

No	Penulis dan Tahun	Krangka Berfikir	Metode	Teknik Analisi Data	Hasil Penelitian	Gap
						kesenjangan entri data kependudukan yang baru 9,42%.
2	Wilda et al. (2024). ³⁷	Pemanfaatan SIGAP dalam peningkatan kualitas pelayanan public	Kualitatif	Analisis deskriptif kualitatif	SIGAP mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi, tergantung kompetensi aparatur	Penelitian Wilda et al. berfokus pada sisi penyedia layanan (supply side), yaitu efisiensi pelayanan administrasi internal aparatur gampong di Aceh Besar. Novelty Penelitian Ini: Penelitian ini meneliti dari sisi penerima layanan (demand side), yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui, mengakses, dan memanfaatkan SIGAP serta mengevaluasi hambatan komunikasi/sosialisasi yang belum menjangkau masyarakat umum.

³⁷ Wilda and Rifaldi, "Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (Sigap) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Gampong Ulee Tuy."

No	Penulis dan Tahun	Krangka Berfikir	Metode	Teknik Analisi Data	Hasil Penelitian	Gap
3	Bahri et al. (2026). ³⁸	SIGAP dalam kerangka smart village dan digital governance	Kuantitatif deskriptif	Analisis statistik deskriptif	Peningkatan akses data (21%) dan transparansi (20%)	Bahri et al. menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur indikator digital governance dan smart village secara umum. Novelty Penelitian Ini: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis Teori Steers untuk membongkar secara mendalam penyebab tingginya turnover operator, lemahnya pengawasan DPMG, serta disparitas penginputan data antar-gampong (seperti Gampong Ujong Kalak).
4	Kurniawan	Pelatihan SIGAP	Kualitatif	Analisis	Pelatihan	Penelitian Kurniawan et al. menekankan

³⁸ Feby Cardova, Nafira Ulya, and Muhammad Indra Budiman, "Transformasi Tata Kelola Melalui Integrasi Sistem Informasi Digital Di Gampong Meunasah Baet," *Meutuah: Jurnal Kreativitas Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2026): 35–46.

No	Penulis dan Tahun	Krangka Berfikir	Metode	Teknik Analisi Data	Hasil Penelitian	Gap
	et al. (2024). ³⁹	untuk peningkatan kapasitas aparatur gampong		deskriptif	meningkatkan kemampuan SDM dan akurasi data	pada aspek input/proses berupa intervensi pelatihan kapasitas teknis aparatur gampong. Novelty Penelitian Ini: Penelitian ini berfokus pada aspek outcome dan adaptasi apakah pelatihan tersebut berdampak pada kontinuitas pembaruan data secara rutin (bulanan/periodik sesuai Pergub Aceh No. 33/2021) dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
5	Zulkifli et al. (2024). ⁴⁰	Pendampingan SIGAP untuk	Kualitatif	Analisis deskriptif	SIGAP meningkatkan	Zulkifli et al. berfokus pada pendampingan tata kelola administrasi internal pemerintah desa

³⁹ Chairuddin Chairuddin and Kurniawan Agus Riezky Purnama Sari, Muhammad Fuad, Rini Mastuti, Fairus Fairus, "DARI TRADISI KE TEKNOLOGI: PELATIHAN SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) MENGUBAH DINAMIKA ADMINISTRATIF DI GAMPONG ACEH," 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jpm.v7i3.955-961>.

No	Penulis dan Tahun	Krangka Berfikir	Metode	Teknik Analisi Data	Hasil Penelitian	Gap
		efisiensi administrasi desa		kualitatif	efisiensi, akurasi data, dan kemudahan akses informasi	di Kabupaten Aceh Tamiang. Novelty Penelitian Ini: Penelitian ini mengevaluasi fungsi SIGAP sebagai media transparansi informasi publik eksternal bagi warga di Kabupaten Aceh Barat serta menganalisis aspek integrasi (koordinasi DPMG, aparatur, dan masyarakat).

Perbedaan utama penelitian ini dengan lima penelitian terdahulu terletak pada sudut pandang subjek, metode, kerangka teori, dan masalah empiris yang dikaji. Penelitian Hanifa et al. (2024), Wilda et al. (2024), Kurniawan et al. (2024), dan Zulkifli et al. (2024) berfokus pada supply side (sisi internal aparatur gampong), yaitu seputar efisiensi administrasi, kesiapan teknis, dan pelatihan operator. Sementara itu, Bahri et al.

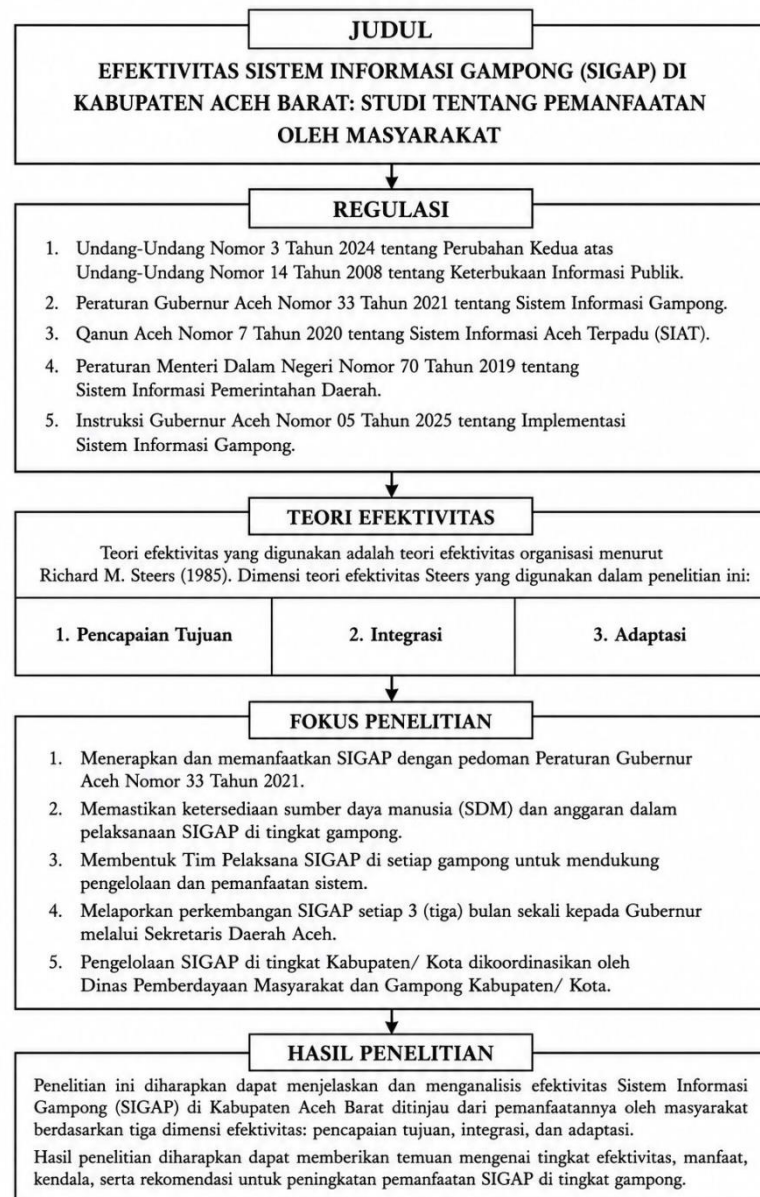
⁴⁰ Zulkifli et al., “Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Layanan Publik Di Desa Paya Awe Aceh Tamiang.”

(2026) menggunakan pendekatan kuantitatif umum. Sebaliknya, peneliti mengkaji dari demand side (sisi masyarakat) secara kualitatif untuk melihat sejauh mana SIGAP benar-benar dimanfaatkan warga sebagai sarana transparansi informasi publik.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Richard M. Steers (1977) (Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi) untuk membongkar masalah empiris spesifik di empat Gampong di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menjawab kesenjangan antara capaian adopsi sistem yang sudah 100% (321 gampong) dengan realisasi entri data kependudukan yang baru 9,42%, disparitas penginputan antar-gampong, tingginya turnover operator, serta sosialisasi DPMG yang belum menjangkau masyarakat umum.



2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena ditujukan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam mengenai efektivitas penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara rinci serta sistematis mengenai bagaimana efektivitas SIGAP ditinjau dari pemanfaatannya oleh masyarakat sebagai sarana transparansi dan keterbukaan informasi publik.⁴¹

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti tidak menitikberatkan pada angka-angka statistik semata, melainkan mengedepankan penggalian makna, pengalaman, respon, serta hambatan mendasar yang dialami oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), baik dari sisi penyedia layanan (supply side) yaitu DPMG dan Aparatur Gampong, maupun dari sisi penerima layanan (demand side) yaitu masyarakat gampong.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, yang berada di Provinsi Aceh. Peneliti tidak mengumpulkan data dari seluruh 321 gampong di Kabupaten tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan data yang mendalam dan kualitatif. Sengaja, lokasi penelitian dipilih pada empat gampong sampel atau lokasi, yang menunjukkan gradasi atau tingkat capaian penginputan data SIGAP di Kabupaten Aceh Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive (sengaja):

⁴¹ M R Sugiyono, "METODE PENELITIAN KUALITATIF. Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif. Cocok Untuk 1. Mahasiswa SI, S2, Dan S3. 2. Dosen Dan Peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020," 2020.

1. Gampong Ujong Kalak (Kecamatan Johan Pahlawan): Mewakili gampong dengan tingkat penginputan data SIGAP tertinggi di Kabupaten Aceh Barat (3.214 entri).
2. Ujong Tanjung (Kecamatan Meurebo): Mewakili gampong dengan tingkat penginputan data kategori rendah.
3. Tegal Sari (Kecamatan Pante Ceureumen): Mewakili gampong dengan kendala teknis dan pembaruan sedang.
4. Krueng Beukah (Kecamatan Pante Ceureumen): Mewakili gampong dengan tingkat penginputan data kategori rendah.

Selain di 4 gampong sampel tersebut, penelitian ini juga mengambil lokasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat sebagai instansi pembina dan pengelola sistem di tingkat kabupaten.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi membatasi ruang lingkup kajian agar analisis terarah dan mendalam. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari Pemanfaatan oleh Masyarakat. Menggunakan kerangka analisis yang digunakan didasarkan pada Teori Efektivitas Organisasi menurut Richard M. Steers (1977), yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:⁴²

1. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment): Menilai sejauh mana SIGAP mencapai sasaran utamanya dalam menyediakan ketersediaan data kependudukan/pembangunan yang lengkap, kontinuitas pembaruan (update) data secara rutin (bulanan, semesteran, tahunan sesuai Pergub Aceh No. 33/2021), serta kemudahan akses dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat.
2. Integrasi (Integration): Menilai kualitas komunikasi, koordinasi, pengawasan oleh

⁴² Steers, "Organizational Effectiveness: A Behavioral View."

DPMG, serta jangkauan sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi SIGAP sebagai media transparansi.

3. Adaptasi (Adaptation): Menilai kemampuan operasional aparatur/operator gampong dalam mengadopsi teknologi digital, tingkat keterampilan teknis, strategi mitigasi terhadap tingginya pergantian (turnover) operator, serta kemampuan dalam menghadapi beban tumpang-tindih aplikasi administrasi pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3 Fokus Penelitian

No	Dimensi	Idicator	Simber Data
1	Pencapaian Tujuan	Kelengkapan Data	DPMG, Apartur dan Masyarakat
		Kuantitas Pembaruan Data	DPMG dan Aparatur
2	Integritas	Pembinaan dan Pengawasan Organisasional	DPMG dan Aparatur
		Sosialisasi dan Edukasi Publik	DPMG, Aparatur dan Masyarakat
3	Adaptasi	Pengelolaan SDM dan Turnover Operator	DPMG dan Aparatur
		Penyesuaian Beban Aplikasi	DPMG dan Aparatur

Sumber : Pendapat Richard M Steers

3.4 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling (penarikan sampel bertujuan). Purposive sampling adalah teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh peneliti, di mana subjek yang dipilih dianggap paling tahu, memiliki wewenang, atau mengalami secara langsung fenomena yang diteliti terkait efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat⁴³

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan oleh besarnya angka kuantitatif, melainkan berdasarkan kecukupan informasi hingga mencapai titik jenuh (data saturation). Penelitian ini menetapkan 10 (dua belas) orang informan yang terbagi secara sistematis ke dalam 3 kelompok utama

Table 4 Tabel Informan

No	Kategori Informan	Status Informan	Lokasi/Lokus	Jumlah
1`	Regulator / Pembina	KABID / KASUBID	DPMG Aceh Barat	1 Orang
2	Pengelola SIGAP Lokus High Entri	Kechik / Sekde / Operator SIGAP	Gp. Ujong Kalak	1 Orang
3	Pengelola Lokus Sedang	Operator / Sekdes	Gp. Tegal Sari	1 Orang
4	Pengelola Lokus Low Entri	Operator / Sekdes	Gp. Ujong Tanjong	1 Orang
6	Pengelola Lokus Low Entri	Operator / Sekdes	Gp. Krueng Beukah	1 orang
7	Kelompok Pengguna	Tokoh Masyarakat	Gp. Ujong	2

⁴³ Prof Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 2019.

No	Kategori Informan	Status Informan	Lokasi/Lokus	Jumlah
		/ warga Pengguna SIGAP	Kalak dan Puuk	Orang
8	Kelompok Bukan Pengguna	Warga (Petani / IRT / Ketua Pemuda / Pedagang	Gp. Krueng Beukah, Tegal Sari, dan Ujong Tanjong	3 Orang
Total				10

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

3.5 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data:

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (informan) melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan. Data primer meliputi tanggapan, persepsi, deskripsi pengalaman, serta fakta lapangan mengenai pelaksanaan penginputan data, pengawasan DPMG, adaptasi teknis operator, hingga pengalaman masyarakat dalam mencari informasi publik desa melalui SIGAP.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, publikasi, dan arsip lembaga. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang SIAT.
3. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2025.
4. Data Rekapitulasi Capaian Entri SIGAP Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 2026.
5. Data BPS Kabupaten Aceh Barat mengenai jumlah penduduk.
6. Jurnal, artikel ilmiah, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan tiga cara utama:

3.6.1 Observasi

Peneliti melakukan observasi non-partisipan langsung di lapangan. Objek pengamatan seperti aktivitas penginputan dan pembaruan data SIGAP oleh operator gampong. Ketersediaan fasilitas pendukung (perangkat komputer, koneksi internet, ruangan kerja operator). Tampilan serta aktualitas publikasi data pada portal/website SIGAP di gampong sampel.

3.6.2 Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview). Hal ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan mendasar berbasis indikator Steers (Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi) sekaligus

mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sesuai dengan dinamika jawaban informan di lapangan.

3.6.3 Dokumentasi

Pengumpulan dokumen dilakukan dengan mencatat, memfoto, dan mengunduh arsip-arsip relevan. Dokumen yang dikumpulkan antara lain rekapitulasi data entri SIGAP dari portal resmi DPMG, dokumen Peraturan Gubernur/Instruksi Gubernur, serta dokumentasi foto pelaksanaan wawancara dan kondisi fasilitas operasional SIGAP di gampong.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari empat tahap yang saling berkaitan:⁴⁴

3.7.1 Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan seluruh hasil wawancara, catatan lapangan hasil observasi, serta dokumen pendukung dari lokasi penelitian.

3.7.2 Reduksi Data (Data Reduction)

Peneliti memilah, memilih, menyeleksi, memfokuskan, dan mengabstraksikan data kasar dari lapangan. Data dikelompokkan sesuai dengan dimensi teori Richard M. Steers (Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi). Data yang tidak relevan dengan efektivitas SIGAP dibuang.

3.7.3 Penyajian Data (Data Display)

Data disajikan dalam bentuk teks naratif yang terstruktur, tabel perbandingan antar-gampong lokus, serta diagram alur. Penyajian ini memudahkan peneliti membaca pola, melihat perbedaan tingkat efektivitas antar-gampong, dan menyusun pembahasan.

⁴⁴ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (sage, 2014).

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Peneliti merumuskan kesimpulan awal secara bertahap berdasarkan pola data yang ditemukan. Kesimpulan terus diverifikasi sepanjang penelitian berjalan hingga diperoleh kesimpulan yang utuh, valid, dan dapat menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas SIGAP di Kabupaten Aceh Barat.

3.8 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan (validitas) dan keterpercayaan (credibility) data kualitatif, peneliti menerapkan teknik Triangulasi menurut Moleong yang meliputi:⁴⁵

3.8.1 Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber informan yang berbeda. Misalnya, membandingkan klaim DPMG mengenai pelaksanaan pengawasan dengan kenyataan yang disampaikan oleh aparatur/operator gampong, serta membandingkan data ketersediaan informasi dari aparatur dengan persepsi yang dirasakan masyarakat.

3.8.2 Triangulasi Teknik

Membandingkan data dari hasil wawancara mendalam dengan temuan observasi langsung di kantor gampong serta bukti otentik dokumen data entri SIGAP. Apabila pernyataan informan sesuai dengan temuan observasi dan dokumen, maka data tersebut dinyatakan valid.

⁴⁵ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. 36. PT Remaja Rosdakarya" (Bandung, 2018).

3.8.3 Triangulasi Waktu

Melakukan konfirmasi ulang atau pengecekan data pada waktu, situasi, dan kesempatan yang berbeda untuk memastikan bahwa jawaban dan fakta yang disampaikan oleh informan bersifat konsisten dan tidak berubah-ubah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati Aceh Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong. DPMG dibentuk sebagai implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan gampong, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan gampong yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai perangkat daerah, DPMG memiliki peran penting dalam membina penyelenggaraan pemerintahan gampong, meningkatkan kapasitas aparatur gampong, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta memfasilitasi berbagai program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Selain melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan gampong, DPMG juga berperan dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui DPMG mendorong penerapan digitalisasi pemerintahan gampong melalui Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Sistem tersebut dikembangkan sebagai media pengelolaan data gampong, penyampaian informasi publik, serta sarana pelayanan administrasi berbasis elektronik. Melalui penerapan SIGAP diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi

mengenai penyelenggaraan pemerintahan gampong secara cepat, mudah, transparan, dan akurat.

Dalam penelitian ini, DPMG Kabupaten Aceh Barat menjadi lokasi penelitian karena instansi tersebut memiliki kewenangan dalam pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Oleh karena itu, DPMG merupakan sumber informasi utama dalam mengkaji efektivitas pemanfaatan SIGAP oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat mengacu pada visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Visi tersebut menjadi arah bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat: *"Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Berintegritas."*

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, DPMG melaksanakan berbagai misi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan gampong yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur gampong melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.

- c. Mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan gampong.
- d. Mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi melalui pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP).
- e. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah gampong dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMG menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong.
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- c. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan gampong.
- d. Pembinaan administrasi pemerintahan gampong.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP).
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah gampong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui tugas dan fungsi tersebut, DPMG menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan gampong berjalan secara efektif, termasuk dalam implementasi SIGAP sebagai salah satu inovasi pelayanan publik berbasis digital.

3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat.

Struktur organisasi DPMG Kabupaten Aceh Barat disusun untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat, bidang-bidang teknis, serta kelompok jabatan fungsional.

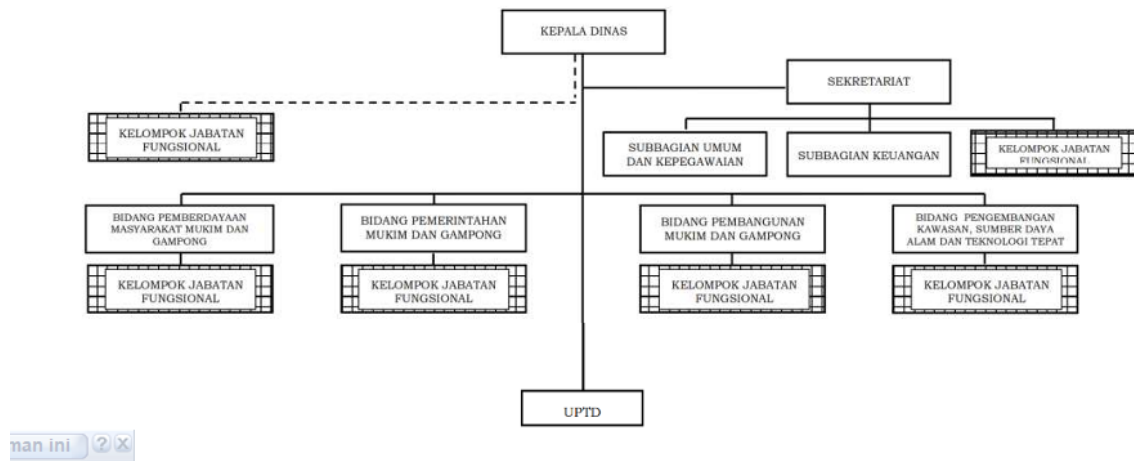
Secara umum struktur organisasi DPMG Kabupaten Aceh Barat terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan Gampong;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Ekonomi Gampong;
- f. Bidang Penataan dan Kerja Sama Gampong;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi tersebut memungkinkan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembinaan pemerintahan gampong, termasuk dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP).

Gambar 1.1.
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

4. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat dalam Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Sebagai instansi yang membidangi pemerintahan gampong, DPMG Kabupaten Aceh Barat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Peran tersebut meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan sosialisasi, pembinaan aparatur gampong, pelatihan operator SIGAP, monitoring, evaluasi, serta pendampingan dalam pengelolaan sistem.

DPMG juga berupaya memastikan bahwa setiap gampong melakukan pembaruan data secara berkala sehingga informasi yang tersedia dalam SIGAP tetap akurat, relevan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, DPMG mendorong pemerintah gampong untuk memanfaatkan SIGAP sebagai media transparansi informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peran DPMG menjadi sangat penting karena keberhasilan implementasi SIGAP tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi, tetapi juga oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMG terhadap pemerintah gampong. Oleh karena itu, profil DPMG menjadi dasar untuk memahami bagaimana kebijakan dan pembinaan yang dilakukan instansi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

4.2 Hasil pengumpulan data

Penelitian ini mengumpulkan informasi dari observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen tentang penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat. Wawancara dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, aparatur pemerintahan gampong, dan masyarakat setempat, baik dari kelompok pengguna maupun non-pengguna portal. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa efektif penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

4.2.1 Efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Ditinjau dari Tiga Dimensi Efektivitas Organisasi di Kabupaten Aceh Barat

1. Dimensi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Dimensi Pencapaian Tujuan menunjukkan seberapa baik implementasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat telah mencapai tujuan utamanya. Ini diukur melalui kelengkapan entri data, konsistensi pembaruan (updating) data dinamis, dan kendala operasional yang dihadapi pengelola. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Subbid DPMG Kabupaten Aceh Barat:

"Penerapan sistem secara konsep sudah baik, namun ketersediaan data pada

portal masih belum lengkap karena kami tidak memiliki mekanisme pengawasan langsung untuk mengontrol pembaruan data gampong setelah pelatihan diberikan. Kendala utama terhentinya entri data ini dipicu oleh fenomena penumpukan berbagai aplikasi administrasi di gampong yang memuat variabel isi serupa."

Analisis menunjukkan bahwa DPMG menilai perencanaan teknis SIGAP dengan baik; namun, pencapaian target entri data fisik masih sangat rendah. Ketika aparat gampong dihadapkan pada banyak aplikasi semacam itu, istilah "app fatigue" muncul, karena langkah pembinaan yang sebatas memberikan pelatihan awal tanpa mekanisme pemantauan yang teratur.

Hasil penelitian bersama Sekretaris Gampong Krueng Beukah menunjukkan bahwa:

"Penginputan data di portal SIGAP sudah pernah dilakukan tetapi hasilnya masih sedikit dan belum lengkap, sementara pembaruan data dinamis berlangsung sangat jarang serta tidak menentu. Hambatan utama penundaan ini bersumber dari tingginya intensitas pergantian operator dan aparat baru yang belum memahami teknis pengoperasian sistem SIGAP."

Analisis menunjukkan bahwa di Gampong Krueng Beukah, pencapaian penginputan data masih terbatas karena banyaknya perputaran staf gampong. Pembaruan data kependudukan dan profil gampong tidak konsisten karena operator baru tidak memahami teknis..

Hasil penelitian bersama Sekretaris Gampong Ujung Kalak (Robi Mulia) menunjukkan bahwa: "Pengisian data di portal SIGAP sebenarnya sudah lumayan banyak dilakukan oleh pengelola lama, namun proses pembaruan data saat ini terhenti karena adanya pergantian operator baru. Stagnasi penginputan ini juga dipengaruhi oleh ketiadaan instruksi atau imbauan langsung dari pihak DPMG Aceh Barat untuk mewajibkan pengunggahan data saat kami berkunjung ke dinas."

Analisis menunjukkan bahwa Gampong Ujung Kalak telah mencapai progres entri data yang baik, tetapi karena pergantian pengelola, tidak ada supervisi dan instruksi dari DPMG yang mendorong pembaruan data secara berkala.

Hasil penelitian mebersama Sekretaris Gampong Ujung Tanjung menunjukkan

bahwa:

"Data gampong kami pada portal SIGAP belum lengkap dan kami belum pernah melakukan pembaruan data sama sekali hingga saat ini. Faktor utama yang menyebabkan tidak berjalannya penginputan data tersebut adalah ketiadaan kegiatan sosialisasi maupun pendampingan teknis secara langsung dari pihak DPMG Aceh Barat kepada aparaturnya gampong kami."

Analisis menunjukkan bahwa pencapaian tujuan Gampong Ujung Tanjung sepenuhnya stagnan. Karena tidak adanya intervensi sosialisasi dan dukungan teknis dari DPMG sebagai instansi pembina, data belum dimasukkan dan tidak diupdate.

Hasil penelitian bersama Keuchik Gampong Putim menunjukkan bahwa:

"Aplikasi SIGAP belum difungsikan dalam sistem kerja gampong sehingga entri data profil maupun anggaran belum lengkap dan pembaruan data sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pengetahuan aparaturnya mengenai eksistensi maupun keberadaan portal SIGAP tersebut dalam tata kelola administrasi gampong."

Analisis bahwa aplikasi SIGAP masih belum dimasukkan ke dalam operasi pemerintah Gampong Putim. Input data kependudukan dan laporan APBG tidak dapat dilakukan karena tidak ada informasi tentang keberadaan portal.

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Ujong Kalak Satpam menunjukkan bahwa:

"Saya mengetahui dan sudah pernah mengakses portal SIGAP untuk keperluan dokumen, namun data yang tersedia di dalam portal tersebut dinilai belum sepenuhnya lengkap. Selain itu, saya pribadi kurang mengetahui apakah proses pembaruan data kependudukan maupun anggaran dilakukan secara berkala oleh aparaturnya gampong."

Analisis menunjukkan bahwa masyarakat pengguna memiliki akses ke portal SIGAP karena kebutuhan administrasi mendesak; namun, dari perspektif kelengkapan informasi publik, pengguna menilai bahwa penyebaran data di portal masih terbatas dan belum menunjukkan konsistensi pembaruan data dari gampong.

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Puuk Sales menunjukkan bahwa:

"Saya mengetahui eksistensi SIGAP dan telah mengaksesnya, akan tetapi sajian data di dalam sistem tersebut masih belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Saya juga tidak dapat memastikan keberlanjutan pembaruan data dinamis yang dilakukan oleh pengelola gampong pada platform tersebut."

Analisis menunjukkan bahwa gampong belum menyediakan informasi publik seperti data penerima bantuan dan transparansi anggaran secara menyeluruh saat menggunakan portal SIGAP secara efektif.

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Ujong Tanjung Wiraswasta menunjukkan bahwa:

"Saya kurang mengetahui apa itu aplikasi SIGAP dan tidak pernah menggunakannya karena tidak mendapatkan informasi mengenai portal tersebut. Selama ini, apabila membutuhkan data atau urusan administrasi, saya selalu meminta dan mendatangi aparatur gampong secara langsung."

Analisis menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Ujong Tanjung belum memperoleh jangkauan sosialisasi SIGAP. Orang-orang masih bergantung pada metode pelayanan tradisional yang melibatkan interaksi langsung dengan staf karena tidak ada informasi tentang aplikasi.

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Tegal Sari IRT menunjukkan bahwa:

"Saya kurang memahami dan belum pernah mendengar keberadaan portal SIGAP sehingga tidak pernah mengoperasikannya. Saya juga tidak mengetahui tingkat kelengkapan maupun keberadaan pembaruan data kependudukan yang ada di dalam aplikasi digital tersebut."

Analisis menunjukkan bahwa warga tidak menggunakan portal ini karena kurangnya literasi publik tentang SIGAP di Gampong Tegal Sari. Orang-orang tidak tahu manfaat sistem dan sajian datanya karena kurangnya pendidikan publik.

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Tegal Sari Dian Pedagang menunjukkan bahwa:

"Saya kurang paham dan tidak pernah mendengar informasi mengenai aplikasi SIGAP sehingga belum pernah menggunakannya. Karena tidak pernah mengakses platform tersebut, saya tidak mengetahui sama sekali ketersediaan maupun pembaruan data di dalamnya."

analisis menunjukkan bahwa distribusi informasi SIGAP belum memadai.

Meskipun tidak memiliki kemudahan layanan digital, masyarakat pedagang dan masyarakat umum masih menggunakan mekanisme urusan kependudukan secara tatap muka.

2. Dimensi Integrasi (Integration)

Penelitian ini berfokus pada dimensi integrasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar-aktor pengelola Sistem Informasi Gampong (SIGAP), termasuk koordinasi teknis, pengawasan, penegakan undang-undang dan sanksi, serta penyebaran informasi (sosialisasi). Ini melihat hubungan kerja antara DPMG Kabupaten Aceh Barat sebagai instansi pembina (supply side), aparatur gampong sebagai pelaksana operasional, dan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan (demand side).

DPMG Kabupaten Aceh Barat bertanggung jawab untuk membangun kerangka kerja yang mengintegrasikan pelaksanaan SIGAP. Ini mencakup koordinasi dengan pemerintah gampong, penerapan instrumen pengawasan dan sanksi, dan strategi sosialisasi ke berbagai tingkatan pemangku kepentingan. Hasil penelitian bersama Subbid DPMG Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa:

"Mekanisme pengawasan terhadap pengolahan SIGAP di tingkat gampong pada dasarnya telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih terbatas pada koridor aturan formal tanpa disertai penerapan sanksi yang tegas, melainkan hanya sebatas pemberian teguran administratif. konsistensi koordinasi tingginya pergantian operator di gampong. Mengenai skema insentif maupun sanksi (reward and punishment), pihak DPMG belum menerapkannya secara eksplisit, di mana pendekatan yang dilakukan sejauh ini masih bertumpu pada upaya pembinaan, pemantauan berkala, dan teguran lisan. Terkait dengan sosialisasi kepada pihak

pemerintah gampong (supply side), DPMG telah menyelenggarakannya melalui agenda pelatihan teknis SIGAP, meskipun dalam pelaksanaannya dijumpai kendala berupa ketidakhadiran sebagian operator gampong saat kegiatan berlangsung. Sementara itu, untuk kegiatan sosialisasi yang menyasar masyarakat umum (demand side) agar mengetahui dan mampu memanfaatkan portal ini, DPMG mengonfirmasi bahwa program tersebut memang belum pernah dilaksanakan."

Analisis kutipan di atas menunjukkan bahwa DPMG telah membangun integrasi kelembagaan yang lemah, dan penegakan hukum masih lemah. Pengawasan yang dilakukan tidak disertai dengan insentif atau sanksi yang jelas, tetapi hanya teguran lisan atau pembinaan formal yang tidak menimbulkan dorongan bagi anggota masyarakat untuk tetap berkomitmen. Karena DPMG sama sekali belum menyelenggarakan sosialisasi khusus untuk memperkenalkan SIGAP kepada warga umum, kendala utama untuk integrasi ke tingkat masyarakat (demand side) adalah keterputusan tata kelola dalam hal sosialisasi ke pihak aparatur (supply side). Di sisi lain, tingkat partisipasi peserta pelatihan yang rendah adalah kendala utama.

Di Gampong Krueng Beukah, integrasi dinilai melalui koordinasi teknis yang aktif dengan DPMG, kontrol internal yang dilakukan oleh Keuchik, dan upaya untuk mendidik warga melalui portal SIGAP. Hasil penelitian bersama Sekretaris Gampong Krueng Beukah menunjukkan bahwa:

"koordinasi teknis antara operator gampong dengan pihak DPMG saat menghadapi kendala pada aplikasi SIGAP, hingga saat ini belum pernah kami lakukan. pengawasan dan verifikasi data internal, pihak Keuchik maupun perangkat gampong lainnya belum menjalankan mekanisme pemeriksaan atau validasi data sebelum informasi tersebut diunggah oleh operator ke dalam portal. Sementara itu, aplikasi SIGAP belum memperkenalkan kepada masyarakat setempat, pemerintah gampong belum pernah melaksanakannya. masyarakat yang lebih menyukai tata cara pelayanan konvensional, menjumpai aparatur gampong secara langsung terhadap layanan atau data"

Analisis diatas bahwa ketiadaan hubungan koordinasi horizontal maupun vertikal di Gampong Krueng Beukah terkait aplikasi SIGAP. Aparatur gampong tidak pernah berkonsultasi dengan DPMG mengenai kendala teknis sistem. Di internal gampong,

fungsi pengawasan oleh Keuchik terhadap validasi data sebelum diunggah juga tidak berjalan. Penyebarluasan informasi ke warga belum dilakukan karena pemerintah gampong menganggap pola interaksi langsung (face-to-face) masih menjadi pilihan utama warga dalam mengurus dokumen administrasi.

Pelaksanaan dimensi integrasi di Gampong Ujung Kalak mengevaluasi saluran komunikasi dengan DPMG pasca-pergantian operator, pengawasan internal, serta strategi pengenalan portal SIGAP kepada publik. Hasil penelitian bersama Sekretaris Gampong Ujung Kalak menunjukkan bahwa:

"kemarin operator baru yang menjabat sejak bulan Agustus, kegiatan koordinasi teknis dengan pihak DPMG terkait operasional sistem SIGAP belum pernah dilaksanakan. Mekanisme pengawasan dan verifikasi data oleh Keuchik atau perangkat gampong sebelum pengunggahan data juga belum terbentuk di gampong kami. Adapun mengenai upaya sosialisasi kepada warga, pemerintah gampong belum menyelenggarakannya secara formal pendekatan yang kami lakukan baru sebatas memberikan penjelasan secara verbal apabila ada masyarakat yang secara kebetulan datang menanyakan data kantor, di mana kami mengarahkan bahwa data tersebut dapat diperiksa melalui portal SIGAP. Belum optimalnya penyebaran informasi ini pada dasarnya disebabkan oleh belum terselenggaranya kegiatan sosialisasi khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat."

Analisis diatas bahwa proses integrasi operasional di Gampong Ujung Kalak mengalami keterputusan pasca pergantian pengelola. Operator baru belum pernah membangun koordinasi teknis dengan DPMG Aceh Barat. Mekanisme kontrol mutu data oleh Keuchik juga belum terbentuk. Dalam hal sosialisasi ke warga, gampong belum memiliki agenda sosialisasi terstruktur dan hanya mengandalkan komunikasi insidental apabila ada warga yang secara kebetulan datang menanyakan data ke kantor gampong.

Pengukuran integrasi di Gampong Ujung Tanjung difokuskan pada intensitas komunikasi dengan DPMG, pengawasan internal gampong, serta pemahaman aparatur terhadap alasan belum berjalannya sosialisasi masyarakat. Hasil penelitian bersama

Sekretaris Gampong Ujung Tanjung menunjukkan bahwa:

"Menegenai koordinasi dengan DPMG terkait kendala teknis aplikasi SIGAP, hingga saat ini belum pernah kami lakukan. Begitu pula dengan mekanisme pengawasan internal, Keuchik maupun perangkat gampong belum pernah melakukan verifikasi data sebelum proses pengunggahan ke portal. Pihak Pemerintah Gampong Ujung Tanjung juga belum melaksanakan memperkenalkan aplikasi ini kepada warga masyarakat. kami selaku aparatur gampong sendiri masih memiliki keterbatasan pemahaman dan belum mengetahui secara mendalam mengenai pengoperasian portal tersebut."

enurut analisis di atas, tingkat integrasi program SIGAP di Gampong Ujong Tanjung sangat rendah. Tidak ada koordinasi dengan DPMG dan pengawasan dari Keuchik menunjukkan bahwa sistem ini belum masuk ke dalam operasi resmi gampong. Aparatur gampong mengklaim tidak memahami sistem secara menyeluruh, yang menyebabkan hambatan sosialisasi ke masyarakat.

Di Gampong Putim, integrasi melibatkan hubungan aparatur gampong dengan dinas pembina, sistem pengendalian data, dan praktik pelayanan publik yang diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Putim menemukan bahwa:

"Menegenai keaktifan koordinasi teknis antara pihak gampong dengan DPMG terkait operasional aplikasi SIGAP, hingga saat ini belum pernah dilakukan. Mekanisme pengawasan dan verifikasi data oleh Keuchik maupun perangkat gampong lainnya sebelum data diunggah ke portal juga belum dilaksanakan. Selain itu, langkah formal untuk mengenalkan portal SIGAP kepada masyarakat setempat belum ada sampai saat ini. Kegiatan sosialisasi kepada warga belum dapat berjalan secara optimal terutama disebabkan oleh budaya pelayanan yang ada, di mana masyarakat lebih memilih untuk menjumpai aparatur secara langsung di kantor gampong apabila membutuhkan pelayanan administrasi atau data kependudukan."

Analisis bahwa tidak ada alur koordinasi teknis ke DPMG dan mekanisme pengawasan internal terhadap data SIGAP. Persepsi aparatur bahwa masyarakat lebih suka budaya pelayanan konvensional (tatap muka) daripada sistem digital, yang menyebabkan tidak adanya sosialisasi portal kepada warga.

Adanya sarana pengaduan dan umpan balik, persepsi keterbukaan aparat, sumber informasi awal, dan bimbingan langsung dari gampong adalah beberapa cara untuk mengukur integrasi dari sudut pandang warga pengguna. Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Ujong Kalak Satpam menunjukkan bahwa:

"Menegenai ketersediaan sarana pengaduan atau konfirmasi apabila dijumpai ketidaksesuaian data pada portal SIGAP, fasilitasi tersebut sebenarnya tersedia di dalam sistem, namun saya pribadi sangat jarang menggunakannya dan tidak pernah mengajukan pelaporan. Terkait tingkat keterbukaan aparat gampong, menurut pengamatan saya mereka tergolong terbuka dalam menerima masukan dari masyarakat secara langsung. Saya pertama kali mengetahui keberadaan portal SIGAP ini dari informasi seorang rekan, yang saat itu saya butuhkan untuk memeriksa dokumen Kartu Keluarga (KK) ketika sedang berada di luar daerah. Adapun mengenai bimbingan atau imbauan langsung dari pihak gampong untuk mengajari warga cara memanfaatkan portal ini, hal tersebut belum pernah dilaksanakan."

Analisis bahwa tingkat keberhasilan masyarakat dalam penggunaan portal SIGAP. Informan mengatakan mereka jarang menggunakan fasilitas tersebut dan belum pernah mengajukan pelaporan, meskipun sistem telah menyediakan sarana pengaduan atau konfirmasi untuk ketidaksesuaian data. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya tertarik untuk memberikan pembaruan data meskipun fitur sistem tersedia. Sebaliknya, aparat gampong dianggap cukup terbuka untuk menerima saran dari masyarakat secara langsung. Namun, informan tidak mengetahui SIGAP melalui sosialisasi dari pihak gampong. Selain itu, belum pernah ada instruksi atau arahan langsung tentang cara menggunakan portal SIGAP. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendampingan dan sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan SIGAP dengan kurang efektif. Akibatnya, kinerja layanan belum optimal.

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Puuk Sales Mobil menunjukkan bahwa:

"Terkait ketersediaan sarana pengaduan untuk mengonfirmasi ketidaksesuaian data pada portal SIGAP, fitur tersebut memang tersedia di dalam aplikasi, akan tetapi saya tidak pernah memanfaatkannya untuk menyampaikan laporan. Berkenaan dengan sikap aparat gampong, mereka dinilai cukup terbuka dalam merespons masukan dari masyarakat secara langsung. Keberadaan dan fungsi portal SIGAP ini pertama kali saya ketahui saat masih menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, di mana pada saat itu pihak DPMG Provinsi sedang menjalin kerja sama dengan pihak kampus dalam rangka mensosialisasikan dan menerapkan sistem SIGAP di seluruh wilayah Aceh. Namun demikian, selama tinggal di gampong, pihak pemerintah gampong setempat belum pernah memberikan imbauan maupun pengajaran secara langsung kepada warga mengenai tata cara penggunaan portal tersebut."

Analisis menunjukkan bahwa meskipun pengguna menyadari fitur pengaduan pada aplikasi, masyarakat tidak menggunakan sarana partisipasi berbasis digital ini secara aktif. Aparatur gampong dianggap cukup ramah dalam komunikasi tatap muka konvensional. Namun, terlihat bahwa sosialisasi formal di tingkat gampong masih kurang. Pengguna tidak mengenal SIGAP melalui saluran sosialisasi resmi dari pemerintah gampong setempat. Sebaliknya, mereka mengenal SIGAP melalui institusi pendidikan tinggi yang pernah bekerja sama dengan DPMG Provinsi Aceh.

Integrasi warga bukan pengguna berfokus pada akses pengaduan, persepsi keterbukaan aparat melalui media digital, dan adanya imbauan langsung dari gampong. Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Ujong Tanjong Wiraswasta menunjukkan bahwa:

"Mengetahui keberadaan sarana pengaduan atau konfirmasi data pada portal SIGAP, saya tidak mengetahuinya. Terkait tingkat keterbukaan aparat gampong, mereka mungkin terbuka jika dihubungi secara langsung, namun jika diukur melalui media informasi digital saya tidak dapat memastikannya. Adapun mengenai sosialisasi, pihak gampong belum pernah memberikan imbauan maupun pelatihan kepada warga mengenai cara membuka dan memanfaatkan aplikasi tersebut."

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Tegal Sari IRT menunjukkan bahwa:

"Saya kurang memahami ketersediaan sarana pelaporan ketidaksesuaian data pada portal SIGAP. dari saya, aparat gampong sangat terbuka dalam memberikan informasi apabila ditanya secara langsung oleh warga, namun keterbukaan mereka melalui media informasi digital belum saya ketahui. Mengenai informasi awal keberadaan portal SIGAP, saya sama sekali belum pernah mengetahuinya, dan pihak pemerintah gampong juga tidak pernah memberikan sosialisasi atau imbauan langsung kepada warga.

Hasil penelitian bersama Masyarakat Gampong Tegal Sari Dian Pedagang menunjukkan bahwa:

"Mengenai tata cara konfirmasi data, biasanya jika ada keperluan masyarakat akan menyampaikannya secara langsung kepada aparat gampong, sedangkan mekanisme konfirmasi melalui media digitalisasi gampong saya tidak mengetahuinya. Sikap aparat gampong selama ini cukup terbuka apabila diajak berinteraksi secara langsung. Saya pribadi belum pernah mendengar atau mengetahui eksistensi portal SIGAP ini sebelumnya, dan pihak gampong pun tidak pernah mengadakan kegiatan untuk mengajari warga cara menggunakan aplikasi tersebut."

Ada jurang integrasi antara penyedia layanan digital dan masyarakat, menurut analisis warga bukan pengguna. Orang-orang di gampong hanya melihat interaksi fisik atau langsung dan tidak tahu sarana pengaduan digital. Masyarakat tidak terpapar aplikasi SIGAP karena tidak ada instruksi atau imbauan langsung dari aparat gampong.

3. Dimensi Adaptasi (Adaptation)

Dimensi Adaptasi mengukur kemampuan manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perputaran sumber daya manusia (turnover), ketersediaan alih pengetahuan (transfer of knowledge), dan penanganan beban kerja yang disebabkan oleh tumpang-tindih aplikasi administrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Subbid DPMG Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa:

"Tingginya pergantian operator gampong berada di luar kewenangan DPMG untuk menahannya, dan kami belum menyediakan pelatihan susulan khusus bagi pengelola baru. Menghadapi keluhan tumpang-tindih aplikasi, kami berupaya meningkatkan kapasitas SDM serta merencanakan pengembangan SIGAP versi terbaru yang terintegrasi langsung dengan sistem kementerian lain."

Analisis menunjukkan bahwa DPMG masih menghadapi beberapa kendala untuk mengurangi turnover operator gampong. Keterbatasan dalam alih pengetahuan teknis disebabkan oleh kurangnya program pelatihan susulan untuk pengelola baru. Dengan meningkatkan kapasitas SDM dan mengintegrasikan data antar-sistem kementerian pada aplikasi versi mendatang, DPMG berkonsentrasi pada rencana jangka panjang untuk mengatasi masalah aplikasi lelah.

Hasil penelitian bersama Sekretaris Gampong Krueng Beukah menunjukkan bahwa:

"Proses serah terima tugas maupun pembekalan teknis bagi operator baru tidak pernah dilaksanakan saat terjadi pergantian pengelola SIGAP di gampong. Di sisi lain, kami dibebankan mengoperasikan aplikasi lain seperti SIKS-NG, SISKEUDES, dan SIPADES yang memuat variabel data serupa, sehingga memecah konsentrasi kerja dan menyebabkan penginputan SIGAP terbengkalai."

Analisis menunjukkan bahwa tidak ada standar operasional prosedur (SOP) serah terima tugas di Gampong Krueng Beukah dan tidak ada pelatihan operator baru. Kondisi ini diperparah oleh tanggung jawab untuk mengelola berbagai aplikasi administrasi sejenis (SIKS-NG, SISKEUDES, dan SIPADES), yang menyebabkan kejenuhan kerja (burnout), yang mengakibatkan abaikan portal SIGAP.

Hasil penelitian bersama Sekretaris Gampong Ujung Kalak menunjukkan bahwa:

"Serah terima alur kerja dan bimbingan teknis tidak pernah diberikan kepada operator baru, sehingga penginputan data SIGAP sempat terhenti. Penumpukan pengisian berbagai aplikasi wajib seperti SIKS-NG, SISKEUDES, IDM, dan SIPADES yang memiliki kesamaan variabel data sangat memecah fokus pengelola dan menimbulkan hambatan dalam penataan administrasi digital gampong."

Analisis, kelemahan adaptasi Gampong Ujung Kalak disebabkan oleh manajemen pengetahuan yang buruk. Kesenambungan entri data terganggu karena pelatihan

susulan dan serah terima jabatan yang diperlukan. Aplikasi tambahan seperti SIKS-NG dan SISKEUDES, yang memiliki konsekuensi evaluasi yang lebih ketat daripada SIGAP, akhirnya diprioritaskan oleh aparatur..

Hasil penelitian bersama Sekretaris Gampong Ujung Tanjung menunjukkan bahwa:

"Aplikasi SIGAP tidak pernah melewati proses serah terima tugas atau pelatihan teknis bagi operator baru, tidak seperti aplikasi wajib lainnya seperti SISKEUDES dan SIPADES. Penyebab utama data SIGAP kami tidak pernah diperbarui bukan karena banyaknya aplikasi, melainkan karena ketiadaan sosialisasi dan petunjuk teknis yang kami terima selama ini."

Analisis bahwa lihat ketimpangan prioritas penyesuaian (disparity of treatment) di antara aplikasi. Aparatur tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengintegrasikan portal SIGAP ke dalam aktivitas pelayanan harian gampong karena kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis.

Hasil penelitian bersama Keuchik Gampong Putim menunjukkan bahwa:

"Tidak ada prosedur serah terima tugas maupun bimbingan teknis bagi operator baru saat terjadi rotasi aparatur pengelola SIGAP. Pemerintah gampong merasa sangat terbantu sekaligus terbebani dengan banyaknya aplikasi wajib lain seperti SIKS-NG, SISKEUDES, dan SIPADES, di mana banyaknya pengisian platform tersebut memecah fokus kerja pengelola di gampong."

Analisis menunjukkan bahwa beban pelaporan yang tinggi ke berbagai platform kementerian (SIKS-NG, SISKEUDES, dan SIPADES) dikombinasikan dengan kekurangan kapasitas untuk operator baru menyebabkan daya adaptasi aparatur gampong pada titik jenuh dan menghentikan penginputan SIGAP.

4.2.2 Faktor Hambatan Efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat

Sebagai hasil dari wawancara dan pemeriksaan dokumen lapangan, ditemukan bahwa sejumlah masalah yang saling berkaitan memengaruhi keberhasilan penerapan

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat yang belum optimal. Hambatan-hambatan tersebut termasuk tingkat teknis operasional, kondisi sumber daya manusia, beban administrasi birokrasi, kelemahan regulasi dan pengawasan, dan kurangnya alur distribusi informasi kepada masyarakat luas.

1. Kerentanan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tingginya Rotasi Operator Gampong

Hambatan pertama yang paling mendasar berada pada tingkat pemerintahan gampong, yaitu turnover operator yang tinggi yang tidak diimbangi oleh sumber daya manusia yang cukup. Jabatan operator gampong sangat sensitif terhadap perubahan politik lokal, seperti pergantian keuchik atau perombakan organisasi pengurus aparatur gampong. Tidak adanya standar prosedur operasional standar untuk alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan serah terima tugas teknis dari operator lama kepada pejabat baru menyebabkan keterputusan dalam pengoperasian sistem.

Operator baru sering kali ditunjuk tanpa alur kerja penginputan data. Hal ini membuat masalah lebih parah karena aparatur memiliki tingkat literasi digital yang rendah dalam mengelola sistem basis data kependudukan dan profil gampong. Akibatnya, proses pembaruan data terhenti sepenuhnya. Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Putim, Sekdes Ujong Kalak, Sekdes Krueng Beukah, dan Sekdes Ujong Tanjung di Kabupaten Aceh Barat:

"Penyebab utama yang menghambat konsistensi penginputan data SIGAP di tingkat gampong adalah tingginya frekuensi pergantian operator gampong. Setiap ada pergantian keuchik atau perangkat, operator ikut berganti, sementara mekanisme alih pengetahuan atau serah terima tugas teknis pengoperasian SIGAP dari operator lama ke operator baru tidak pernah ada. Akibatnya, operator baru yang dilantik tidak memahami tata cara penginputan dan pengoperasian portal SIGAP."

Sebuah kerentanan kelembagaan, atau kerentanan institusional, ditemukan dalam

pengelolaan data digital di tingkat gampong. Aplikasi SIGAP tidak terintegrasi ke dalam sistem organisasi gampong karena prosedur alih pengetahuan institusional (institutional memory). Setelah personel dirotasi, keahlian teknis mereka hilang, sehingga proses pembaruan data digital berhenti.

2. Beban Administrasi Akibat Fragmentasi Multi Aplikasi Sektoral (Administrative Burden)

Salah satu hambatan kedua adalah beban administrasi yang besar. Ini karena banyak aplikasi pemerintahan sektoral yang terpisah, dan aparatur gampong harus menjalankannya. Harian, aparatur gampong harus menginput data ke berbagai sistem dari kementerian pusat. Sistem-sistem ini termasuk SISKEUDES untuk pengurusan keuangan gampong, SIKS-NG untuk data kesejahteraan sosial, SIPADES untuk aset gampong, dan IDM dan Profil Gampong.

Aplikasi ini pada dasarnya berfokus pada elemen data yang serupa dan tumpang-tindih. Portal SIGAP tidak dapat melakukan integrasi atau penarikan data otomatis dari sistem kementerian, yang menyebabkan aparatur gampong mengalami kelelahan input. Mereka juga lebih memprioritaskan aplikasi kementerian yang terkait langsung dengan evaluasi kinerja atau pencairan dana desa, sehingga mengabaikan pengisian portal SIGAP. Hasil wawancara dengan Aparatur Gampong Putim, Subbid DPMG Kabupaten Aceh Barat, Sekdes Ujong Kalak, Sekdes Krueng Beukah, dan Sekdes Ujong Tanjung:

"Beban kerja penginputan data aparatur gampong sangat tinggi karena harus menginput data pada banyak aplikasi sektoral lain seperti SISKEUDES, SIKS-NG, SIPADES, dan IDM/Profil Gampong yang substansi datanya tumpang-tindih dan isinya sama saja. Karena portal SIGAP belum terintegrasi secara otomatis dengan aplikasi-aplikasi kementerian tersebut, kami memprioritaskan aplikasi yang berhubungan langsung dengan dana desa, sehingga pembaruan SIGAP sering terabaikan. Untuk menyikapi keluhan ini, DPMG memang sedang merencanakan

pengembangan SIGAP versi terbaru agar dapat menarik data secara terintegrasi dari sistem kementerian lain seperti Kemendagri."

Analisis kutipan menunjukkan bahwa kondisi ini menunjukkan kelumpuhan operasional karena sistem informasi dibagi menjadi silos digital. Jika aparatur gampong memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk mengelola banyak aplikasi yang berbeda tanpa fasilitas interoperabilitas, organisasi harus mendahulukan aplikasi yang memiliki konsekuensi moneter. Dengan demikian, SIGAP ditempatkan di urutan terendah dalam rangkaian tugas administrasi harian gampong.

3. Kelemahan Regulasi, Pengawasan Berjenjang, dan Penegakan Sanksi

Kelemahan kelembagaan, termasuk regulasi, pengawasan berjenjang, dan alat penegakan hukum, merupakan hambatan ketiga. Sejauh ini, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat masih bersifat formal-normatif, yaitu sebatas memberikan arahan dan mengawasi pelaksanaan aturan dasar, tanpa memiliki ukuran target kinerja kelengkapan data yang dievaluasi secara berkala. Selain itu, tidak ada sanksi administratif atau konsekuensi yang mengikat bagi gampong yang pasif mengupdate data. Akibatnya, komitmen aparatur gampong terhadap SIGAP sangat rendah.

Selain itu, pengawasan ini tidak terstruktur di tingkat internal gampong, di mana proses kontrol kualitas dan verifikasi validitas data oleh Keuchik atau Sekretaris Desa sebelum didistribusikan ke portal belum selesai. Hasil wawancara dengan Aparatur Gampong Putim, Subbid DPMG Kabupaten Aceh Barat, Sekdes Ujong Kalak, Sekdes Krueng Beukah, dan Sekdes Ujong Tanjung:

"Fungsi pengawasan dari DPMG telah dilaksanakan secara regulatif namun terbatas pada berlakunya peraturan dan pemberian teguran lisan atau imbauan, tanpa dibarengi penerapan sanksi administratif yang mengikat bagi gampong yang tidak memperbarui data. Di tingkat internal gampong sendiri, prosedur

pengawasan, pemeriksaan, atau verifikasi data oleh Keuchik sebelum data diunggah ke portal SIGAP juga belum pernah diterapkan secara resmi."

Analisis kekurangan regulasi ini menunjukkan bahwa belum ada sistem akuntabilitas dalam manajemen SIGAP. Tanpa instrumen penegakan sanksi DPMG dan pengawasan internal di tingkat keuchik, kepatuhan gampong terhadap manajemen SIGAP hanyalah secara sukarela. Akibatnya, gampong tidak sangat berkomitmen untuk memperbarui data mereka.

4. Minimnya Sosialisasi Publik dan Keterbatasan Pendampingan Teknis

Hambatan keempat adalah kurangnya program pendidikan berkelanjutan dan kurangnya akses ke pendidikan publik. Tidak mungkin bagi DPMG Kabupaten Aceh Barat untuk menyediakan pelatihan teknis susulan kepada operator baru yang diangkat setelah rotasi di gampong. Dalam hal penerima layanan, sosialisasi pengenalan portal SIGAP yang dilakukan oleh dinas dan pemerintah gampong masih terfokus pada aparatur dan tidak menysasar pengguna akhir.

Orang-orang sering memilih untuk berinteraksi secara tradisional dengan mengurus semua dokumen administrasi kependudukan secara tatap muka di kantor keuchik. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui fungsi dan keberadaan portal digital karena tidak adanya informasi dan sosialisasi resmi. Hasil wawancara dengan aparatur gampong putim, kelompok masyarakat pengguna dan non-pengguna, Sekdes Ujong Kalak, Sekdes Krueng Beukah, dan Ujong Tanjung, Subbid DPMG Kabupaten Aceh Barat:

"DPMG mengakui pelatihan teknis sejauh ini baru diberikan pada tahap awal dan belum dapat menyediakan pelatihan susulan secara berkala bagi operator-operator baru. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang menysasar masyarakat umum secara khusus belum pernah diselenggarakan baik oleh DPMG maupun pemerintah gampong. Akibatnya, warga tidak mendapatkan informasi atau imbauan resmi mengenai portal SIGAP dan tetap memilih datang langsung ke kantor keuchik

untuk mengurus dokumen administrasi secara tatap muka."

Hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama untuk penggunaan teknologi adalah perbedaan alur diseminasi informasi antara kedua belah pihak (supply dan demand). Ketiadaan sosialisasi publik mencegah partisipasi publik dan permintaan (demand) masyarakat, sementara kekurangan pelatihan susulan menghentikan pengelola sistem untuk berubah di tingkat gampong. Karena kombinasi kedua hal ini, sistem SIGAP tidak dapat lagi berfungsi sebagai media pelayanan publik berbasis digital.

4.3 Analisis Pengolahan Data

Untuk mengubah data mentah yang dikumpulkan dari lapangan menjadi struktur informasi yang sistematis, logis, dan bermakna, analisis pengolahan data adalah tahap penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, pengolahan data didasarkan pada tahapan analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan: reduksi data (reduksi data), penyajian data (penayangan data), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Data diproses melalui konvergensi dan triangulasi tiga metode pengumpulan data: observasi non-partisipasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan sepuluh (atau sepuluh) informan penting. Data ini diproses utamanya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, bersama dengan empat (empat) gampong sampel: Gampong Ujong Kalak, Gampong Ujong Tanjung, Gampong Tegal Sari, dan Gampong Krueng Beukah.

4.3.1 Pengolahan Data Hasil Observasi

Data observasi diolah dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengoordinasikan fakta faktual lapangan terkait elemen sarana pendukung, prosedur input

data, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital. Berikut ini adalah ringkasan hasil sintesis dari observasi yang dilakukan pada masing-masing lokus penelitian:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat

Hasil pengolahan observasi menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang memadai, yang mencakup perangkat server dan jaringan internet berkecepatan tinggi, tersedia. Karena itu, pemantauan portal SIGAP di tingkat kabupaten masih terpusat dan belum didukung oleh jadwal bimbingan teknis dan supervisi langsung secara berkala ke tingkat gampong. Selain itu, tidak ada sarana edukasi visual yang cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya menggunakan SIGAP di kantor dinas..

2. Gampong Ujong Kalak

Pengolahan data lapangan memastikan ketersediaan fasilitas komputer dan jaringan internet yang stabil. Proses penginputan data dilakukan oleh operator, yang melakukannya secara teratur dan berkelanjutan. Namun saat ini operator baru belum melakukan update secara berskala.

3. Gampong Ujong Tanjung

Namun, ketersediaan perangkat keras komputer dicatat dalam hasil pengolahan observasi; koneksi internet stabil. Proses penginputan data berlangsung secara tidak berjalan setelah pergantian pimpinan aparatur gampong. Selain itu, tidak ada sumber daya sosialisasi atau petunjuk teknis yang dapat membantu masyarakat memahami cara mengakses portal SIGAP secara mandiri.

4. Gampong Tegal Sari

Observasi menunjukkan bahwa ada sarana komputer dan akses internet yang dianggap cukup. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh pengolahan data operasional, proses input data masih kurang menyeluruh. Ini terutama berlaku

untuk pembaruan data kependudukan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Sejauh ini, data SIGAP di lokus ini hanya dapat digunakan untuk administrasi internal pemerintah gampong.

5. Gampong Krueng Beukah

Dari segi fasilitas sudah bagus sampai jaringan internet sudah bagus, hanya tidak ada pembaruan data kependudukan dinamis, tetapi partisipasi penginputan data juga sangat rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi publik berbasis SIGAP di pemerintahan gampong tersebut belum optimal.

4.3.2 Pengolahan Data Hasil Dokumentasi

Data sekunder diolah dengan menggunakan sistem basis data SIGAP Kabupaten Aceh Barat untuk memilah, mengategorikan, dan menganalisis secara kritis peraturan resmi, arsip administratif, dan rekapitulasi numerik entri data.

1. Pengolahan Dasar Hukum dan Landasan Regulasi

Dokumen Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2025, bersama dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021, menetapkan bahwa Sistem Informasi Gampong (SIGAP) akan digunakan sebagai satu-satunya sumber data untuk merencanakan dan memaparkan pembangunan tingkat desa di Aceh. Kehadiran klausul hukum yang mewajibkan pemerintah gampong untuk memberikan pembaruan data secara berkala bulanan, semesteran, dan tahunan telah dikonfirmasi selama proses pengolahan dokumen.

2. Pengolahan Data Kuantitatif Rekapitulasi Entri Data

Populasi total Kabupaten Aceh Barat adalah 205.108 orang, menurut data yang diolah dari dokumen BPS (2023). Hasil analisis dokumentasi basis data SIGAP

pada DPMG menunjukkan bahwa total entri data kependudukan baru mencapai 19.327 orang, atau sekitar 9,42% dari total. Ini menunjukkan ketimpangan, atau disparitas, capaian entri yang signifikan antar-gampong lokus. Gampong Ujong Kalak memiliki jumlah masuknya jiwa tertinggi sebesar 3.214, sementara tiga (tiga) gampong sampel lainnya memiliki jumlah masuknya jiwa kurang dari 15% dari total populasi gampong tersebut.

4.3.3 Reduksi Data Wawancara (Kategorisasi Berdasarkan Teori Efektivitas)

Konseptualisasi, pemfokusan, pengabstraksian, dan eliminasi data yang tidak relevan adalah proses yang digunakan untuk mengurangi volume data. Berdasarkan kerangka teori Richard M. Steers, data mentah dari transkrip wawancara bersama sepuluh informan dikelompokkan dan disintesis ke dalam tiga dimensi Efektivitas Organisasi.:

1. Dimensi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Beberapa poin penting muncul sebagai hasil dari proses reduksi data wawancara pada aspek ini:

- a. Target capaian yang ditetapkan belum dipenuhi, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk memasukkan data kependudukan, profil gampong, dan transparansi APBG ke dalam portal SIGAP belum dilakukan secara menyeluruh.
- b. Operator gampong hampir tidak pernah memberikan pembaruan data dinamis seperti data kematian, kelahiran, dan migrasi penduduk secara berkala.
- c. Portal SIGAP tidak memberikan informasi publik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat lokal untuk akses informasi.

2. Dimensi Integrasi (Integration)

Beberapa poin penting muncul sebagai hasil dari proses reduksi data

wawancara pada aspek ini:

- a. Tidak ada koordinasi dan komunikasi teknis yang terstruktur antara pihak DPMG Kabupaten Aceh Barat dan aparat pemerintah gampong.
- b. Sistem kontrol, verifikasi, dan validasi internal oleh Kepala Desa (Keuchik) terhadap keabsahan data yang dimasukkan oleh operator gampong kurang efektif.
- c. Sosialisasi program SIGAP berbasis masyarakat, atau sosialisasi sisi permintaan, belum pernah dilakukan. Akibatnya, partisipasi dan pemahaman masyarakat sangat rendah.
- d. Tugas pembinaan dan pengawasan DPMG masih terbatas pada arahan formal, belum memiliki alat evaluasi yang konsisten, dan belum ada sanksi yang jelas..

3. Dimensi Adaptasi (Adaptation)

Proses reduksi data wawancara pada dimensi ini menghasilkan beberapa poin kuncinya:

- a. Tidak ada standar operasional prosedur (SOP) serah terima tugas yang baku dan proses peralihan pengetahuan (transfer of knowledge) untuk mengimbangi jumlah pergantian operator gampong yang tinggi.
- b. DPMG belum memberikan pelatihan penyegaran (refreshment training) yang berkelanjutan kepada operator gampong yang baru diangkat.
- c. Kelelahan penginputan aplikasi (app fatigue) di tingkat aparat gampong karena banyaknya aplikasi sektoral kementerian (seperti SISKEUDES, SIKS-NG, SIPADES, dan IDM) yang belum terintegrasi secara teknis (interoperability) dengan portal SIGAP.

4.4 Analisis Data

Tujuan dari analisis data penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan, mengaitkan, dan menguji temuan data kualitatif yang telah diolah menggunakan kerangka teori efektivitas organisasi model Richard M. Steers. Berdasarkan triangulasi data dari observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan sepuluh informan penting, analisis efektivitas pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi utama:

4.4.1 Analisis Dimensi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2025, ukuran pencapaian tujuan menunjukkan seberapa jauh operasionalisasi portal SIGAP mampu mencapai tujuan strategis. Terwujudnya basis data tunggal (single data) untuk perencanaan pembangunan gampong yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua orang adalah tujuan utama dari implementasi SIGAP.

1. Capaian Kuantitatif Entri Data Kependudukan

Data kependudukan baru secara keseluruhan mencapai 19.327 orang, atau 9,42% dari total populasi Kabupaten Aceh Barat sebanyak 205.108 orang, menurut hasil analisis data dokumentasi DPMG (BPS, 2023). Hasil yang belum mencapai sepuluh persen ini menunjukkan bahwa tujuan integrasi data kependudukan daerah ke dalam portal SIGAP secara kuantitatif tidak efektif.

2. Pembaruan Data Dinamis dan Disparitas Antar-Gampong

Sebagai hasil dari analisis data, ditemukan bahwa ada perbedaan kinerja yang tajam di antara gampong lokus. Karena operasional penginputan yang relatif konsisten, Kampong Ujong Kalak dapat mencatatkan 3.214 entri data kependudukan.

Sebaliknya, pembaruan data dinamis seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk terhenti secara signifikan di Gampong Ujong Tanjung, Tegal Sari, dan Krueng Beukah. Data portal seringkali tidak akurat dan statis, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau perencanaan pembangunan gampong.

3. Kualitas Keterbukaan dan Aksesibilitas Informasi Publik

Dari sudut pandang transparansi publik, portal SIGAP gampong sampel tidak menyediakan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), serta laporan realisasi fisik yang lengkap. Ini melanggar persyaratan keterbukaan informasi publik artinya, portal belum benar-benar meningkatkan akses masyarakat ke informasi di tingkat gampong.

4.4.2 Analisis Dimensi Integrasi (Integration)

Dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan SIGAP, dimensi integrasi berkonsentrasi pada bagaimana hubungan antar-lembaga berfungsi dengan baik, mekanisme koordinasi teknis, pengawasan internal, dan cara komunikasi sosialisasi publik (demand-side).

1. Lemahnya Koordinasi Vertikal dan Mekanisme Pengawasan Internal

Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa belum ada koordinasi teknis yang terstruktur antara DPMG Kabupaten Aceh Barat dan pemerintah gampong. Di lapangan, DPMG tidak memiliki rencana supervisi dan verifikasi data berkala. Kepala Desa (Keuchik) di tingkat gampong belum melakukan fungsi validasi internal terhadap data yang dimasukkan oleh operator gampong. Tidak adanya verifikasi berjenjang dapat menyebabkan data yang diunggah ke portal tidak akurat atau valid.

2. Absensi Sosialisasi Berbasis Masyarakat

Tidak ada kemajuan dalam melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama program. Sejauh ini, baik DPMG maupun pemerintah Gampong hanya melakukan sosialisasi internal kepada staf. Tidak ada upaya untuk memberi tahu masyarakat tentang keberadaan dan cara mengakses portal SIGAP. Akibatnya, masyarakat kurang menyadari dan tidak terlibat secara aktif dalam memanfaatkan portal digital tersebut.

3. Minimnya Instrumen Pengawasan dan Sanksi

Imbauan formal melalui surat edaran masih berlaku untuk tugas pengawasan (supervisi) yang dilakukan DPMG selama ini. DPMG tidak memiliki alat penegakan hukum atau sanksi yang jelas untuk pemerintah gampong yang tidak memasukkan data. Karena dampak administratif dan finansial ini, tugas input data di tingkat gampong diabaikan..

4.4.3 Analisis Dimensi Adaptasi

Dimensi adaptasi menilai kemampuan sistem dan organisasi untuk menanggapi dinamika perubahan internal, seperti ketersediaan sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan pelatihan, dan integrasi teknis antarsistem aplikasi.

1. Tingginya Angka Pergantian Operator dan Ketiadaan SOP Alih Tugas

Jumlah operator gampong yang berubah seiring dengan perubahan dalam struktur kepengurusan politik lokal adalah salah satu kendala utama bagi efektivitas SIGAP. Baik mekanisme penyerahan tugas maupun alih pengetahuan (transfer of knowledge) tidak terlibat dalam pergantian posisi ini. Mayoritas operator baru yang diangkat tidak memiliki pemahaman teknis tentang cara mengoperasikan sistem basis data SIGAP.

2. Ketiadaan Program Pelatihan Berkelanjutan

Tidak ada pelatihan rutin untuk operator gampong yang baru dilantik oleh DPMG Kabupaten Aceh Barat. Pada awal peluncuran program, pelatihan DPMG masih bersifat insidental. Aparatur gampong mengalami penurunan kapasitas operasional yang signifikan sebagai akibat dari ketiadaan dukungan teknis yang berkelanjutan.

3. Fenomena App Fatigue dan Kendala Interoperabilitas Sistem

Operator gampong dikenakan tugas mengisi berbagai aplikasi sektoral yang menumpuk dari berbagai kementerian, seperti SISKEUDES (Kemenkeu/BPKP), SIKS-NG (Kemensos), SIPADES (Kemendagri), dan IDM (Kemendes PDTT). Aplikasi tersebut bekerja secara parsial dan belum terintegrasi secara teknis (interoperability) dengan portal SIGAP. Akibatnya, operator gampong mengalami kelelahan penginputan (app fatigue) dan duplikasi kerja. Pada akhirnya, ini menyebabkan pengabaian penginputan data portal SIGAP.

4.5 Pembahasan

Penelitian membahas bagaimana Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Kabupaten Aceh Barat berfungsi dengan baik dan apa yang membuatnya sulit dilaksanakan. Pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan adaptasi adalah tiga dimensi efektivitas organisasi yang disebutkan Richard M. Steers dalam diskusi ini.⁴⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada dimensi pencapaian tujuan (goal attainment), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat belum melaksanakan SIGAP secara efektif untuk mewujudkan tata kelola data digital yang terpusat dan modern. Ini sejalan dengan gagasan Steers, yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai target output dan dampak yang telah ditetapkan adalah ukuran efektivitas. Stagnasi entri data APBG dan kependudukan di

⁴⁶ Steers, "Organizational Effectiveness: A Behavioral View."

gampong sampel (Putim, Ujong Tanjung, Krueng Beukah, dan Ujong Kalak) menunjukkan bahwa pembaruan data telah berhenti di tahap pelatihan awal dan tidak memiliki keberlanjutan dalam operasi. Ini mendukung temuan Wilda et al.⁴⁷ Karena pentingnya sistem bagi masyarakat umum dan penelitian Bahri et al. tentang keberlanjutan entri data, tujuan utama digitalisasi untuk penyediaan layanan dan keterbukaan informasi publik otomatis tidak akan tercapai ketika penginputan data dihentikan.

Pada dimensi integrasi (integration), temuan lapangan memperlihatkan masih rendahnya tingkat kepatuhan kelembagaan dan keterhubungkaitkan antar-aktor pelaksana. Berdasarkan teori Steers, integrasi menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, sosialisasi berjenjang, serta kepatuhan anggota terhadap aturan main organisasi. Di tingkat internal gampong, integrasi terhambat oleh absennya verifikasi data oleh Keuchik serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) alih pengetahuan saat rotasi aparatur. Sementara pada tingkat eksternal (demand-side), kesenjangan diseminasi informasi menyebabkan masyarakat tidak mengenal portal SIGAP dan tetap memilih layanan konvensional secara tatap muka. Hal ini memperkuat temuan Hanifa et al.⁴⁸ Terkait keterbatasan literasi digital pelaksana serta penelitian Kurniawan et al.⁴⁹ Mengenai krusialnya pengawasan kelembagaan; ketiadaan sosialisasi kepada warga serta absennya skema insentif dan sanksi (reward and punishment) dari DPMG menyebabkan kepatuhan gampong mengelola SIGAP hanya bersifat sukarela (voluntary).

Pada dimensi adaptasi (adaptation), hasil analisis mengindikasikan bahwa daya penyesuaian kelembagaan DPMG maupun pemerintah gampong berada pada posisi yang

⁴⁷ Wilda and Rifaldi, "Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (Sigap) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Gampong Ulee Tuy."

⁴⁸ Hanifa and Shinta, "Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar."

⁴⁹ A D E KURNIAWAN, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN PENDEKATAN MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE DI KABUPATEN OGAN ILIR," n.d.

rentan terhadap perubahan lingkungan internal dan teknologis. Menurut Steers, adaptasi diukur dari kemampuan organisasi dalam merespons dinamika SDM serta menyelesaikan masalah operasional lingkungan kerja. Penemuan di lapangan menunjukkan DPMG belum mampu memitigasi tingginya turnover operator gampong karena tidak tersedianya pelatihan teknis susulan (refreshment training). Di sisi lain, aparatur mengalami kelelahan penginputan (input fatigue) akibat tumpang-tindihnya berbagai aplikasi sektoral kementerian (SISKEUDES, SIKS-NG, SIPADES, IDM) yang tidak terintegrasi secara otomatis (interoperability). Temuan ini sangat sejalan dengan penelitian Zulkifli et al.⁵⁰ Mengenai fragmentasi sistem informasi (digital silos); dalam keterbatasan waktu dan beban administrasi, aparatur secara rasional lebih memprioritaskan aplikasi kementerian yang terikat langsung dengan evaluasi kinerja atau pencairan dana desa, sehingga menempatkan portal SIGAP pada prioritas terendah.

⁵⁰ Zulkifli et al., “Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Layanan Publik Di Desa Paya Awe Aceh Tamiang.”

BAB V

KESIMPULAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari kerangka Teori Efektivitas Organisasi Richard M. Steers (1977) yang mencakup dimensi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi, penerapan SIGAP di Kabupaten Aceh Barat dari pemanfaatannya oleh masyarakat secara umum belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari capaian entri data kependudukan yang sangat minim, yaitu baru mencapai 9,42% (19.327 entri data) dari total 205.108 jiwa penduduk Kabupaten Aceh Barat, sehingga portal belum fungsional bagi publik. Keterputusan alur integrasi eksternal akibat absennya sosialisasi publik membuat warga tidak mengetahui eksistensi portal SIGAP dan secara konsisten tetap mempertahankan pola pelayanan tatap muka konvensional di kantor keuchik. Penyesuaian budaya digital di tingkat masyarakat juga belum terbentuk karena sistem belum memberikan fitur kemudahan layanan yang dirasakan secara langsung oleh warga.
2. Pemanfaatan SIGAP oleh dua faktor utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi ketersediaan infrastruktur jaringan internet di lokasi penelitian dan adanya payung hukum Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2021. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketiadaan sosialisasi dan edukasi publik (demand side) oleh DPMG maupun Pemerintah Gampong, rendahnya kevalidan dan pembaruan data kependudukan, tingginya rotasi (turnover) operator

gampong pasca-pemilihan keuchik tanpa transfer of knowledge, beban penginputan multi-aplikasi kementerian yang tumpang-tindih (digital silos), serta masih kuatnya keterikatan masyarakat pada budaya pelayanan tatap muka konvensional

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) & Pemerintah Gampong: DPMG hendaknya menyelenggarakan sosialisasi publik masif kepada masyarakat, membangun integrasi data otomatis (API Interoperability) antara SIGAP dan aplikasi kementerian untuk mengatasi digital silos, menerbitkan SOP alih tugas operator gampong guna memitigasi turnover, serta menerapkan sistem reward and punishment dalam pengalokasian Alokasi Dana Gampong (ADG). Sementara itu, Keuchik diharapkan menjamin kepastian kerja operator berprestasi melalui SK Keuchik dan rutin melakukan verifikasi kevalidan data gampong.
2. Bagi Masyarakat: Masyarakat hendaknya mulai membangun kesadaran digital (digital literacies) dengan secara aktif mempelajari dan memanfaatkan portal SIGAP untuk mengakses informasi pembangunan gampong maupun mengurus administrasi kependudukan, serta berpartisipasi proaktif dalam memberikan masukan data kependudukan yang akurat kepada aparat gampong.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif atau Mixed Methods guna menguji hubungan variabel seperti literasi digital masyarakat, kepemimpinan keuchik, atau insentif kerja terhadap tingkat adopsi sistem informasi gampong. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat berfokus pada evaluasi aspek aspek teknis interoperabilitas data atau keamanan data pribadi (data privacy) pada aplikasi SIGAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, JDIH. "QANUN ACEH NO.MOR 7 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU," 2020.
- Adi, Isbandi Rukminto. "Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," 2015.
- Aprianty, Diah Rachma. "Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2016): 1589–1602.
- Cardova, Feby, Nafira Ulya, and Muhammad Indra Budiman. "Transformasi Tata Kelola Melalui Integrasi Sistem Informasi Digital Di Gampong Meunasah Baet." *Meutuah: Jurnal Kreativitas Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2026): 35–46.
- Chairuddin, Chairuddin, and Kurniawan Agus Riezky Purnama Sari, Muhammad Fuad, Rini Mastuti, Fairus Fairus. "DARI TRADISI KE TEKNOLOGI: PELATIHAN SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) MENGUBAH DINAMIKA ADMINISTRATIF DI GAMPONG ACEH," 2024. [https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jpm.v7i3.955-961](https://doi.org/10.31604/jpm.v7i3.955-961).
- Dalam, Menteri, and Negeri Republik. "BERITA NEGARA," no. 1114 (2019).
- Gampong, Sistem Informasi, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Indonesia Nomor. "Gubernur Aceh," 2021, 2–10.
- Hanifa, Dina, and Nia Shinta. "Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Pada Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 48–60.

Heeks, Richard. *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*.

Routledge, 2017.

Helmi, S, M Ip, S Nofriadi, M Ip, Effendi Hasan, S Muliawati, M Ip, Soraya Agustina, Arif

Abdillah, and Nival Misbahul Amin. *Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Gampong*

Dalam Mewujudkan Percepatan Pelayanan Dan Pembangunan Melalui Sistem

Informasi Gampong (Sigap). CV. Green Publisher Indonesia, 2024.

Jogiyanto, Hartono M. "Sistem Informasi Keperilakuan." *Yogyakarta: Andi Offset* 235

(2007).

"Jumlah_entri_per_gampong_2026-05-19T04_02_49," 2026.

KURNIAWAN, A D E. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI

APLIKASI SEMESTA DENGAN PENDEKATAN MULTIPLE STREAMS/CRITICAL

JUNCTURE DI KABUPATEN OGAN ILIR," n.d.

Mardiasmo, M B A. *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.

Mergel, Ines, Noella Edelmann, and Nathalie Haug. "Defining Digital Transformation:

Results from Expert Interviews." *Government Information Quarterly* 36, no. 4 (2019):

101385.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*.

sage, 2014.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. 36. PT Remaja

Rosdakarya." Bandung, 2018.

Mukhsin, Mukhsin. "Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem

Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi." *Teknokom* 3, no. 1

(2020): 7–15.

NAZIRA, KASIFA. “IMPLEMENTASI WEBSITE SISTEM INFORMASI GAMPONG (SIGAP) DI GAMPONG TAMBON BAROH KECAMATAN DEWANTARA.” Universitas Malikussaleh, 2024.

Pasolong, Dr Harbani. *Teori Administrasi Publik*. DR Harbani Pasolong, 2007.

Redaksi. “Diskominfo Komit Latih KIG Berdayakan Website Gampong Dan SIGAP,” 2019.
<https://www.acehtrend.com/news/diskominfo-aceh-komit-latih-kig-berdayakan-website-gampong-dan-sigap/index.html>.

Setyawan, Arief, Achluddin Ibnu Rochim, and Bambang Kusbandrijo. “Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469) 2, no. 02 (2022): 43–52.

Steers, Richard M. “Organizational Effectiveness: A Behavioral View.” (*No Title*), 1977.

Sugiyono, M R. “METODE PENELITIAN KUALITATIF. Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif. Cocok Untuk 1. Mahasiswa SI, S2, Dan S3. 2. Dosen Dan Peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020,” 2020.

Sugiyono, Prof Dr. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.” *Bandung: Alfabeta*, 2019.

Terpadu, Aceh, and Informasi Gampong. “Gubernur Aceh,” 2025, 1–2.

Wilda, Raihan, and Abid Rifaldi. “Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong (Sigap) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Gampong Ulee Tuy.” *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 40–46.

Zulkifli, Zulkifli, Riyadhul Fajri, Reza Pahlevi, Vianaza Vianaza, and Putri Amanda.

“Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Layanan Publik Di Desa Paya Awe Aceh Tamiang.” *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)* 4, no. 1 (2025): 24–30.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wanwancata

PEDOMAN WAWANCARA: DPMG KABUPATEN ACEH BARAT

A. DIMENSI PENCAPAIAN TUJUAN (GOAL ATTAINMENT)

1. Kelengkapan Data Gampong

- a. Bagaimana DPMG menilai capaian kelengkapan data gampong di SIGAP saat ini, mengingat entri data kependudukan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 9,42%?

Jawab: memang penerapan kita sudah bagus cuman kalau data yg tersedia belum lengkap

- b. Apa langkah strategis DPMG untuk mendorong gampong yang entri datanya masih sangat minimal agar segera melengkapi basis datanya?

Jawab kita sudah memberikan pelatihan dek dengan memastikan ketersediaan sdm

2. Kontinuitas Pembaruan Data (Update Berkala)

- a. Sejauh mana DPMG memantau dan memastikan keberlanjutan pembaruan data dinamis (kependudukan dan APBG) yang dilakukan gampong secara berkala?

Jawab ngak ada, karna kita ngak bisa control mereka untuk update data, karna sosialisasi sudah di berikan.

- b. Kendala utama apa yang ditemukan DPMG terkait berhentinya penginputan data gampong setelah tahap uji coba awal?

Jawab Sepertinya karna terlalu banyak aplikasi yg isinya sama dek

B. DIMENSI INTEGRASI (INTEGRATION)

1. Pembinaan & Pengawasan Organisasional

- a. Bagaimana bentuk koordinasi, pembinaan, dan pengawasan rutin yang dijalankan DPMG terhadap pengelola SIGAP di tingkat gampong?

Jawab

- b. Apakah DPMG menerapkan mekanisme sanksi atau reward bagi gampong terkait tingkat keaktifan penginputan data ke SIGAP?

2. Sosialisasi & Edukasi Publik

- a. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi SIGAP yang selama ini dilakukan DPMG kepada pihak pemerintah gampong (supply side)?
- b. Apakah DPMG memiliki program sosialisasi khusus yang menasar masyarakat umum (demand side) agar warga tahu dan mau menggunakan SIGAP?

C. DIMENSI ADAPTASI (ADAPTATION)

1. Pengelolaan SDM & Turnover Operator

- a. Bagaimana DPMG menyikapi tingginya angka pergantian (turnover) operator gampong akibat dinamika politik lokal?
- b. Bagaimana mekanisme pendampingan atau pelatihan susulan dari DPMG untuk menjamin alih pengetahuan (transfer of knowledge) bagi operator baru?

2. Penyesuaian Beban Multi-Aplikasi Digital

- a. Bagaimana tanggapan DPMG terhadap keluhan aparatur gampong mengenai banyaknya aplikasi administrasi pemerintahan yang harus diisi secara terpisah?
- b. Apakah ada wacana atau upaya dari DPMG untuk menyinkronkan data SIGAP dengan sistem lain (seperti SIPD, SISKEUDES, Prodeskel) guna mengurangi beban kerja operator?

PEDOMAN WAWANCARA: APARATUR / OPERATOR GAMPONG (5 LOKUS)

A. DIMENSI PENCAPAIAN TUJUAN (GOAL ATTAINMENT)

1. Kelengkapan Data Gampong

- a. Sejauh mana kelengkapan data kependudukan, profil gampong, dan laporan anggaran (APBG) yang berhasil diunggah gampong Anda ke SIGAP? Sudah hampir sepenuhnya lah kalau data
 - b. Kendala internal apa yang paling menyulitkan gampong dalam mengumpulkan data yang valid dan lengkap untuk diinput ke dalam sistem? Tidak ada kendala
2. Kontinuitas Pembaruan Data (Update Berkala)
- a. Seberapa rutin gampong Anda memperbarui (update) data dinamis ke aplikasi SIGAP (apakah bulanan, tahunan, atau tidak tentu)? Sebulan lah tetapi tidak menentu juga
 - b. Faktor apa yang membuat proses pembaruan data di portal SIGAP gampong Anda sering mengalami penundaan atau terhenti? Ganti operator baru

B. INTEGRASI (INTEGRATION)

1. Pembinaan & Pengawasan Organisasional
 - a. Seberapa sering operator gampong berkoordinasi dengan DPMG jika menemukan kendala teknis atau error pada sistem SIGAP?
 - b. Apakah Keuchik atau perangkat gampong lainnya melakukan pengawasan dan verifikasi data sebelum operator mengunggahnya ke portal SIGAP?
2. Sosialisasi & Edukasi Publik
 - a. Langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Gampong untuk mengenalkan portal SIGAP kepada masyarakat setempat?
 - b. Mengapa kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi portal SIGAP kepada warga belum dapat berjalan secara optimal?

C. ADAPTASI (ADAPTATION)

1. Pengelolaan SDM & Turnover Operator
 - a. Bagaimana proses serah terima tugas dilakukan apabila terjadi pergantian operator SIGAP di gampong Anda?

- b. Apakah operator baru mendapatkan panduan atau pelatihan yang memadai agar penginputan data SIGAP tidak terbengkalai?
- 2. Penyesuaian Beban Multi-Aplikasi Digital
 - a. Berapa banyak aplikasi administrasi pemerintahan yang wajib diisi oleh gampong selain SIGAP (misal: SISKEUDES, Prodeskel, SIPD)?
 - b. Sejauh mana tumpang-tindih beban penginputan multi-aplikasi tersebut membagi fokus dan menyebabkan kendala operasional bagi operator?

PEDOMAN WAWANCARA: MASYARAKAT GAMPONG (USER & NON-USER)

A. PENCAPAIAN TUJUAN (GOAL ATTAINMENT)

- 1. Kelengkapan Data Gampong
 - a. Apakah Anda mengetahui atau pernah mengakses portal Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di desa Anda?
 - b. Bagi yang pernah mengakses: Apakah informasi yang tersedia (seperti penerima bantuan atau anggaran APBG) sudah cukup lengkap dan transparan?
- 2. Kontinuitas Pembaruan Data (Update Berkala)
 - a. Apakah Anda melihat informasi kegiatan atau data publik gampong di SIGAP selalu diperbarui sesuai kondisi terkini?
 - b. Ketika ada perubahan data warga atau bantuan, apakah informasi tersebut cepat disesuaikan oleh pihak gampong di dalam portal?

B. INTEGRASI (INTEGRATION)

- 1. Pembinaan & Pengawasan Organisasional
 - a. Jika Anda menemukan ketidaksesuaian data pada portal SIGAP, apakah ada sarana bagi warga untuk melaporkan atau mengonfirmasinya ke gampong?

- b. Menurut Anda, seberapa terbuka aparat gampong dalam menerima masukan warga terkait keterbukaan data dan informasi publik?

2. Sosialisasi & Edukasi Publik

- a. Dari mana Anda pertama kali mendengar atau mengetahui adanya portal SIGAP ini?
- b. Apakah pihak gampong pernah mengimbau atau mengajak warga secara langsung tentang cara membuka dan memanfaatkan portal SIGAP?

Lampiran 2 Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Bidang
Pengelolaan SIGAP Oleh (DPMG)



Gambar 2. Wawancara Dengan Aparatur gampong Ujung Kalak



Gambar 3. Wawancara Dengan Aparatur gampong Ujung Tanjung



Gambara 4. Wawancara Dengan Aparatur gampong Putim



Gambar 5. Wawancara Dengan Aparatur gampong Krueng Beukah





Gambar 6. Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Tegal Sari (non user)



Gambar 7. Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Ujung Kalak (user)



Gambar 8. Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Tegal Sari (non user)



Gambar 9. Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Puuk (user)



Gambar 10. Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Krueng Beukah (non user)

Lampiran 3 Surat Keputusan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 514/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 Maret 2026**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si** Sebagai pembimbing I
2. **Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Imam Afdhali**
- NIM : **210802081**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Efektivitas Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Di Kabupaten Aceh Barat : Studi Tentang Pemanfaatan Oleh Masyarakat**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Maret 2026
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.